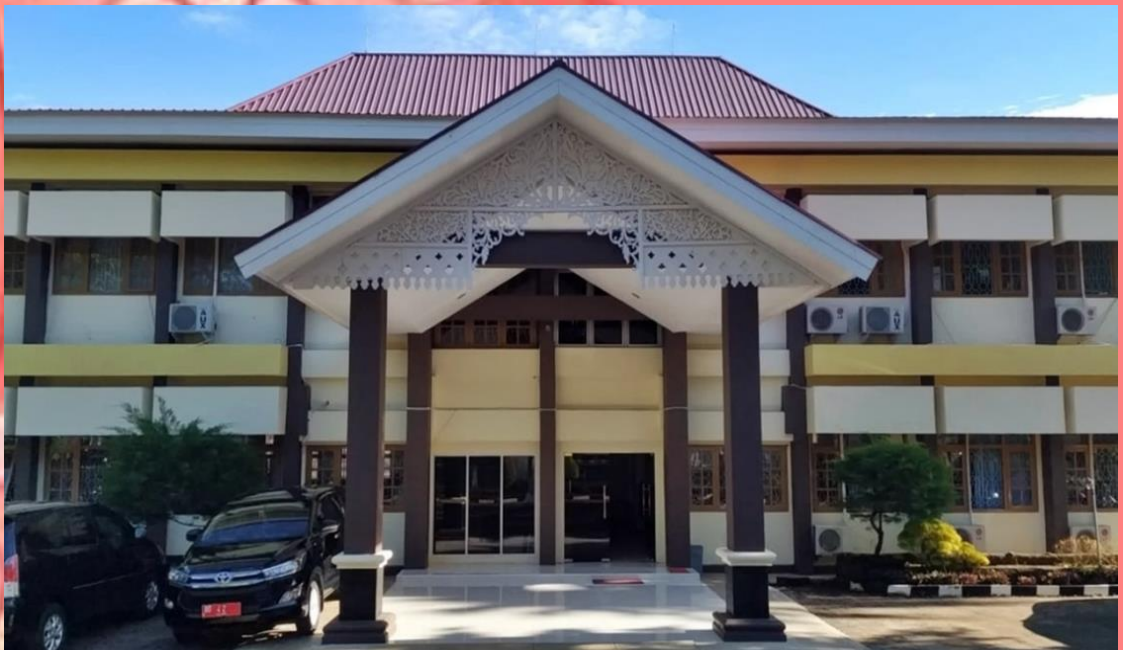




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU



LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) TAHUN 2018



KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2018 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Bengkulu, Februari 2019
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu



H. LIERWAN, SE

Pembina Utama Madya (IV/c)
Nip. 19610420 198512 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam pembangunan ekonomi Bengkulu adalah meningkatkan daya saing industri dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Dalam Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu 2018, sektor perdagangan berada diposisi kedua (14.85 persen) setelah pertanian, kehutanan dan perikanan (28,65 persen); perdagangan besar dan eceran (14.85 persen) diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (10.01) persen. Sektor perdagangan menjadi salah satu lapangan usaha utama dalam perekonomian Bengkulu. Sementara itu, sektor perindustrian berada di posisi keenam sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi Bengkulu (6.15 persen). Artinya bahwa sektor perdagangan dan industry berperan sebagai motor penggerak ekonomi utama perekonomian Bengkulu (21 persen).

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampumenjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian atau realisasi terhadap target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran ke-1: Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Populasi Industri kecil, menengah dan besar diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha IKM dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 133.56 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-1 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori kurang dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat baik.
2. Sasaran ke-2: Dalam upaya meningkatkan penguatan struktur industri dan peningkatan produktivitas usaha industri diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Capaian kinerja sasaran ke-2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “cukup” dan rata – rata persentase capaian 67.99 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-2 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori “baik” dan 1 (satu) indikator dengan kategori “kurang”.

3. Sasaran ke-3: Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada peningkatan unit usaha perdagangan dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-3 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 96.5 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator, 1 indikator dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori baik.
4. Sasaran ke-4: Dalam upaya meningkatkan produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Bengkulu diarahkan pada peningkatan nilai ekspor per tahun, peningkatan jumlah eksportir dan penurunan nilai impor Bengkulu. Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor Bengkulu Tahun 2018 sebesar 157% dengan kategori “sangat baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori sangat baik.
5. Sasaran ke-5: Dalam upaya meningkatkan manajemen tata kelola OPD diarahkan kepada peningkatan sistem perencanaan yang holistik, tematik, terintegrasi dan berbasis pencapaian kinerja program, kegiatan dan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia per tahun. Capaian kinerja Nilai SAKIP OPD tahun 2018 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik” dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori baik.

Terkait dukungan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.978.314.692,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.264.032.093,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 92,84 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.676.867.120,00,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.060.701.005,- (Dua Belas Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Rupiah) atau sebesar 95.14 persen.

Beberapa faktor keberhasilan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

ASPEK KELEMBAGAAN:

- a. Operasional Pelayanan Kantor, dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2018 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.
- b. Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas

Perindustrian dan Perindag Prov. Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

- c. Jumlah Forum sinergi pengembangan Indag melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Forum sinergi pengembangan Indag yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Rapat Kerja Indag (yang juga berlaku sebagai Forum OPD bidang Indag se-Provinsi Bengkulu dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahun 2018) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 bertempat di villa hijau Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari instansi Pemerintah, baik horisontal maupun vertikal. Kegiatan dimaksudkan untuk menghimpun masukan terkait dengan pengembangan urusan industri dan perdagangan di Bengkulu. Hasil dari forum tersebut juga menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindag Prov. Bengkulu (Renja OPD).

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Peningkatan Jumlah sentra industri yang dibina dalam gerakan pemberdayaan industri dimana Jumlah sentra industri yang dibina pada tahun 2018 sejumlah 8 kawasan.
- b. Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan.
- c. Peningkatan Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi. Industri unggulan Provinsi Bengkulu yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
- d. Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan melalui rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037
- e. Dukungan pengembangan Kawasan Terpadu Dekranasda Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor industri kerajinan daerah dan mendorong DEKRANASDA untuk memfasilitasi pemasaran dari industri kerajinan daerah, pada tahun 2018 telah dilaksanakan launching/peresmian kawasan terpadu Dekranasda sebagai sentra kerajinan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi showroom produk kerajinan daerah dari 10 Kab/Kota.
- f. Bertambahnya unit usaha industri yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, baik sektor industri besar sedang dan sektor industri kecil menengah mengalami penambahan unit usaha dengan total unit usaha sebanyak 6.401 Unit usaha, bertambah sebanyak 353 unit usaha industri tumbuh.
- g. Meningkatnya realisasi investasi industri besar sedang di Provinsi Bengkulu. Meningkatnya realisasi investasi sektor industri besar sedang dipengaruhi oleh unit usaha yang telah mendapatkan ijin prinsip penanaman modal 3 (tiga) tahun terakhir memulai pelaksanaan investasinya di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pada tahun 2018 juga dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan perusahaan industri besar sedang dengan cakupan 50 perusahaan Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar.

- h. Peningkatan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. Upaya pemuktahiran data industri kecil menengah dan industri besar sedang pada tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menyajikan kinerja industri tahun 2018. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunan data perkembangan industri terus dilaksanakan dalam rangka menyajikan data perkembangan yang sesuai dengan perkembangan industri daerah tahun 2018.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.
- b. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.
- c. Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk dalam negeri dan penyelenggaraan Bengkulu Expo setiap tahun.
- d. Pelaksanaan Monitoring dan pembinaan pasar secara berkala;
- e. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan pasar tradisional/pasar rakyat dan pembangunan sarana kemetrolitian pada beberapa kabupaten/kota. Untuk tahun 2018, terdapat 28 pasar yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/kota yang difasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan dana DAK Tahun 2018.
- f. Melaksanakan rekapitulasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan inventarisasi/pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan yang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota;
- g. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.
- h. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan.
- i. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi dengan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK Muka Muka untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
- j. Peningkatan Jumlah Eksportir Baru dan Pelayanan Dokumen Ekspor-impor, Target indikator tersebut adalah 380 dokumen. Dengan realisasi sebanyak 305 Dokumen Ekspor Impor dengan rincian 303 Dokumen SKA dan 2 Dokumen API yang telah diterbitkan selama kurun waktu tahun 2018. Kemudahan dalam mengajukan perizinan ekspor dengan menggunakan aplikasi online dan pelatihan serta fasilitasi bagi pelaku usaha di Provinsi Bengkulu untuk menjadi eksportir akan sangat menunjang upaya daerah menumbuh kembangkan eksportir baru terutama UKM.

- k. Peningkatan Fasilitas pelatihan dan bimbingan teknis diversifikasi produk berorientasi ekspor kepada IKM Provinsi Bengkulu sebanyak 30 pelaku usaha. Diharapkan dengan semakin banyaknya pelaku eksportir Bengkulu akan meningkatkan diversifikasi produk dan tujuan pasar ekspor Bengkulu yang akhirnya meningkatkan nilai ekspor Bengkulu secara keseluruhan.
- l. Peningkatan fasilitas pemasaran komoditi unggulan daerah seperti kopi dan kalamansi pada skala nasional. Rangkaian branding kopi Bengkulu telah dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir selain itu dalam pelaksanaan fasilitas pameran kopi di tingkat nasional telah mendapatkan beberapa calon buyer yang sangat prospektif dalam meningkatkan ekspor kopi Bengkulu dalam pasar nasional. Selain itu, pada tahun 2018 Kopi Robusta Kepahiang telah mendapatkan pengakuan indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga menambah penguatan citra kopi Bengkulu di pasar kopi nasional.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

ASPEK KELEMBAGAAN:

- a. Belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri Provinsi Bengkulu dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;
- b. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu
- c. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- d. Beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertambahan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal
- e. Belum maksimalnya penyajian data perkembangan realisasi investasi dan realisasi produksi sektor besar – sedang dikarenakan masih belum adanya kesadaran perusahaan melaporkan perkembangan realisasi usaha dan nilai produksi yang menjadi salah satu indikator peningkatan nilai investasi sektor industri di Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan pendataan yang dilakukan aparaturnya kabupaten/kota masih belum menyajikan data secara menyeluruh;
- f. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM karena tidak tersedianya anggaran dalam pemuktahiran data IKM, sehingga pemuktahiran data masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat;

- g. Belum tersedianya sistem atau instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama;
- h. Beberapa unit usaha ditemukan vakum produksi artinya tidak ditemukan proses produksi akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitor baru sehingga mempengaruhi peningkatan unit usaha dan peningkatan realisasi investasi. Adapun peningkatan unit usaha dan realisasi investasi hanya terjadi pada wirausaha baru yang tumbuh pada tahun 2018.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Tidak tercapainya target Jumlah BPSK yang terbentuk disebabkan oleh tidak. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota.
- b. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya.
- c. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data karena keterbatasan anggaran. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.
- e. Kendala kinerja ekspor impor daerah yang paling utama adalah tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatasi oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu.
- f. Belum optimalnya pelayanan pengujian mutu barang BPPMB Tahun 2018 akibat terhapusnya klausa yang mengatur retribusi pengujian mutu barang pada PERDA Retribusi Tahun 2018 mengakibatkan pelayanan pengujian mutu barang tidak dapat dilakukan yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

- g. Belum tersedianya peralatan kalibrasi dan peralatan pengujian komoditi ekspor daerah yang menjadi potensi PAD dan ditambah masih terbatasnya jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang menjadi kendala lain yang menghambat dukungan terhadap kinerja ekspor daerah;
- h. Pelaksanaan promosi produk ekspor daerah masih belum dilakukan optimal karena keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

ASPEK KELEMBAGAAN:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang industri dan perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.
5. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan ,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
6. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
7. Melakukan revisi terhadap PERDA Retribusi dengan memasukkan klausa retribusi pengujian mutu barang dan kalibrasi agar menjadi dasar dalam menjalankan pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi
8. Peningkatan Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi Sertifikasi Mutu Barang, diperlukan tambahan ruang lingkup pengujian seperti ruang lingkup pengujian minyak goreng sawit dan minyak kelapa dan penambahan alat kalibrasi. Serta melakukan promosi secara gencar, sehingga dapat berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan (eksportir) untuk mengujikan produks eksportnya dan

mengkalibrasi alat labnya di Lab BPPMB. Terlebih lagi BPPMB ini telah melakukan networking dengan lab-lab besar di pusat seperti lab Balai dan Balai Besar dibawah Kemenperind dan Kemendag.

9. Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya perlu ditambah agar dapat mendukung pelayanan prima dan menghasilkan potensi PAD

ASPEK URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Menfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
2. Menfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
3. Menfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
4. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
5. Melakukan pemuktahiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
6. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk Kabupaten/Kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra – sentra yang vakum atau berhenti produksi untuk kemudian difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal dan bantuan peralatan/mesin;
7. Melakukan pembinaan dari aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk maju dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar;
8. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
9. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya;
10. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitas Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP

maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu

11. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan.
12. Dalam rangka mendorong kinerja ekspor daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2019
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu



H. LIERWAN, SE
Pembina Utama Madya (IV/c)
Nip. 19610420 198512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Pendahuluan	1
b. Dasar Hukum	1
c. Gambaran Organisasi	3
d. Kekuatan Sumber Daya yang ada	6
e. Kondisi Sarana dan Prasarana	7
f. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	9
a. Rencana Strategis.....	9
b. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
a. Pencapaian Kinerja Sasaran.....	16
a.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.....	17
a.2 Analisa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	19
a.2.1 Sasaran Strategis Ke-1 “Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri	19
a.2.1.1 Indikator Kinerja Utama “Persentase Pertumbuhan Industri Tahun.....	21
a.2.1.2 Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Sektor Industri”	23
a.2.1 Sasaran Strategis Ke-2 “Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri”	26
a.2.2.1 Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB”	29
a.2.2.2 Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri”	31
a.2.3 Sasaran Strategis Ketiga “ Meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri”.....	35
a.2.3.1 Indikator Kinerja Utama “ Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri”	38
a.2.3.2 Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB”	39
a.2.4 Sasaran Strategis Ke-4 “Meningkatnya Ekspor Daerah”	47
a.2.4.1 Indikator Kinerja Utama “Nilai Ekspor”	48
a.2.5 Sasaran Strategis Ke-5 “Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan melalui sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel”	55
a.2.5.1 Indikator Kinerja Utama “Nilai Sakip”	57
b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2018	60
b.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	60
b.2 Realisasi Keuangan Tahun 2018	60
BAB IV PENUTUP	60
a. Kesimpulan	64
b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	6
Tabel 1.2	Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2018	7
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan INDAG Tahun 2016-2021	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu Tahun 2018	17
Tabel 3.2	SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018	19
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018	20
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	20
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	20
Tabel 3.7	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	21
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	21
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
Tabel 3.10	SASARAN STRATEGIS 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018	27
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018	27
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2	27
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	28
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	28
Tabel 3.15	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	28
Tabel 3.16	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	28
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel 3.18	SASARAN STRATEGIS 3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018	36
Tabel 3.19	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018	36
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3	36
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	36
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	37
Tabel 3.23	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	37
Tabel 3.24	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	37
Tabel 3.25	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.26	SASARAN STRATEGIS 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018	47
Tabel 3.27	Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018	47
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4	47
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	47
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	48
Tabel 3.31	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	48
Tabel 3.32	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	48
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48

Tabel 3.34	Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Bengkulu Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2014 - 2018)	50
Tabel 3.35	Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017	56
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5	56
Tabel 3.37	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	56
Tabel 3.38	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	56
Tabel 3.39	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	57
Tabel 3.40	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	57
Tabel 3.41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
Tabel 3.42	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	60
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran APBD Per Program Tahun 2018	60
Tabel 3.44	Realisasi APBN Tahun 2018	62



DAFTAR TABEL

No	Nama Grafik	Hal
Grafik 3.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional (Non Migas) Tahun 2014 – 2018	22
Grafik 3.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Thd PDRB Th 2014 – 2018 (Dalam Trilyun)	29
Grafik 3.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Thd Nasional Th 2014 – 2018 (Dalam Trilyun)	30
Grafik 3.4	Perkembangan Unit Usaha Industri di Provinsi Bengkulu 2014-2018	31
Grafik 3.5	Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Bengkulu Th 2014- 2018	32
Grafik 3.6	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan antara Bengkulu dibandingkan terhadap nasional tahun 2013-2017	38
Grafik 3.8	Nilai Sektor Perdagangan Bengkulu Thd Nasional	39
Grafik 3.9	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap PRDB	39
Grafik. 3.10	Nilai Bersih Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bengkulu (2013-2017)	49

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2018. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

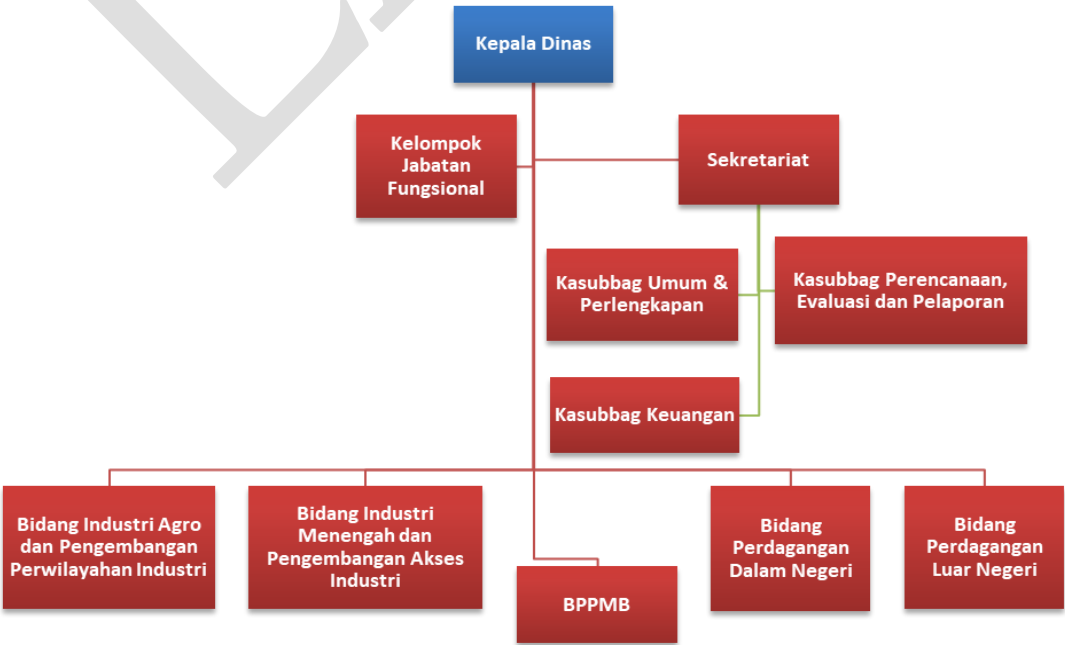
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
- 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Daerah Provinsi Bengkulu;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.
- 17. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Nomor : 012.a Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

C. Gambaran Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
- 2. Pengelolaan dan fasilitasi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- 3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
- 5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
- 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 7. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 (satu) Eselon II, 6 (enam) Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 Bidang Teknis serta 1 (satu) UPTD, 18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, dengan tugas “mengarahkan program kerja, Mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri dengan tugas“Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industry, Pengelolaan sistem informasi industry, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota, Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota”.
3. Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri dengan tugas“Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah.”
4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota, Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen”.
5. Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor, Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor”.
6. UPTD Badan Penelitian dan Pengujian Mutu Barang (BPPMB).
7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional, Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, Seorang tenaga fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada dilingkungan dinas, Jumlah jabatan fungsional ditentukan

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
 - Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - Peningkatan Standarisasi Industri;
 - Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.
6. Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan sektor industri dan meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri.

Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya yang ada, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jabatan Eselon							
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	Pejabat Struktural						Pejabat Fungsional	
																			II		III		IV			
																			a	b	a	b	a	b		
1	SD	1		1																						
2	SLTP	2						1	1																	
3	SLTA	17						2	4			7		4											4	
4	D.1	-																								
5	D.2	-																								
6	D.3	3								1	1		1													
7	S.1	68									9	19	13	21	5			1	1		1		16		9	
8	S.2	12											3	3	1	5					4	1	2		2	
9	S.3	-																								
Jumlah		103		1				3	5	1	10	26	17	28	6	5		1	1		5		18		15	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2018

1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	Mobil	6	2			v	Gedung Kantor	5	0		v	-	
2	Motor	8	15			v	Rumah Dinas	1	5		v	-	
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	2	0		v	-	
4							Meja	25	123		-	v	
5							Kursi	34	72		-	v	
6							Kursi Lipat	0	100		-	v	
7							Kursi Putar	25	50		-	v	
8							Kursi Tamu	0	13		-	v	
9							Komputer	25	15		-	v	
10							Printer	37	20		-	v	
11							Laptop/ Notebook	16	1		-	v	
12							Air Conditioner	27	0		-	v	

13							Lemari	2	5		-	v	
14							Filling Cabinet	5	8		-	v	
15							Infocus/Proyektor	2	4		-	v	
16							Peralatan Laboratorium	31	0		-	v	
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1		-	v	

Sumber : Data Inventarisir Barang dan Aset OPD, Tahun 2018

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

b. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan.

c. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018.

d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja.

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Bengkulu Tahun 2018.

e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi kedua dan keempat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local” dan “Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Dengan tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Perindag Prov. Bengkulu, antara lain (1) Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri; (2) Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kurun waktu 2016-2021 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 tersebut, maka Kepala Dinas telah menetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yaitu menjadikan ***“Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
2. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
3. Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi dan persebaran industri
2. Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri
3. Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri
4. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 (satu) Peningkatan populasi dan persebaran industri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri yang diukur dari Indikator Kinerja Utama: (1) Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan (2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Tujuan 2 (dua) Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri yang diukur dari Indikator Kinerja Utama: (1) *Nilai Investasi Sektor Industri* dan (2) *Persentase peningkatan tenaga kerja industri*;
3. Tujuan 3 (tiga) Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dari Indikator kinerja Utama: (1) *Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri* dan (2) *Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Bengkulu*;
4. Tujuan 4 (empat) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor yang diukur dari Indikator Kinerja Utama: (1) *Persentase Peningkatan nilai Ekspor, Nilai Ekspor* dan (2) *Persentase penurunan nilai impor*;
5. Tujuan 5 (lima) Peningkatan Kualitas Kelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel yang diukur dari *Indikator Kinerja Utama: (1) Nilai SAKIP* dan (2) *Nilai LPPD*
 - b. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi yang diukur dari *Indikator Kinerja Utama (1) Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP* dan (2) *penerapan E-Government*.

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ketiga belas program tersebut adalah:

Program Prioritas yang meliputi:

1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam uji komersialisasi hasil penelitian, dan pengembangan rancangan produk baru, maupun proses produksi serta pemanfaatan sumber daya lokal.

2. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA kabupaten / kota secara optimal, mengembangkan OVOP, mengembangkan

industri kreatif, meningkatkan daya saing industri industri kecil dan menengah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi

4. Program Pengembangan Industri Agro

Program ini bertujuan memperkuat basis produksi untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri yang berbasis sumber daya alam hasil pertanian perkebunan;

5. Program Penataan Struktur Industri

Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu dan meningkatkan penyediaan Kawasan Industri di provinsi Bengkulu serta penataan tata ruang.

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan balai penelitian dan pengujian mutu barang, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Provinsi Bengkulu, serta meningkatkan peran ekspor barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Provinsi Bengkulu

9. Program Persaingan Usaha

10. Program Penunjang yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu

anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
8. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
10. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah
11. Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeler
5. Pembangunan Anjungan Gedung Dekranasda
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Progam Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian hari – hari tertentu

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
4. Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi OPD (PPID)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Pengendalian Pendistribusian Bahan Pokok
2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
3. Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen di Provinsi Bengkulu
4. Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport dan Impor
2. Warta Informasi Ekspor dan Impor (Statistik Ekspor Impor)
3. Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu
4. Konferensi Kopi Daerah dan Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu
5. Lomba Inovasi Khas Daerah
6. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport dan Impor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Penyajian Informasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
2. Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

1. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
2. Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan
3. Pembinaan dan Pengembangan OVOP Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Fasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Industri Agro

1. Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro
2. Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri yang diukur dari Nilai Investasi Sektor Industri dan Persentase peningkatan tenaga kerja industri.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Bengkulu.
4. Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor yang diukur dari Persentase Peningkatan nilai Ekspor, Nilai Ekspor dan Persentase penurunan nilai impor

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan INDAG Tahun 2016-2021

MISI	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi	Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah	Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional
TUJUAN	Peningkatan populasi dan persebaran industri	1. Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen 2. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Peningkatan Kualitas Kelembagaan
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri 2. Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	1. Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri 2. Meningkatnya Ekspor Daerah	1. Meningkatnya Tata Kelola OPD 2. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu dan Gubernur Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, dengan format seperti yang digambarkan dalam matriks di bawah:

Tabel 2.2: Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri	1	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	%	14.9
	2	Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar	176.5
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6.3
	4	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	%	12
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	5	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	%	9
	6	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	%	14.10
Meningkatnya Ekspor Daerah	7	Nilai Ekspor	Trilyun	1.407
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	8	Nilai Evaluasi SAKIP	Score	BB

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Keberhasilan/kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing – masing sasaran strategik, tujuan dari setiap misi.

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal Dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.

Untuk mengukur pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2018, terlebih dahulu diinventarisir hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilakukan analisa serta pembobotan terhadap hasil analisisnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018;
2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sasaran kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$
2. Semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$
3. Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kualifikasi sebagai berikut :
Persentase : > 100 Sangat baik
 80 – 100 Baik
 55 – 80 Sedang
 < 55 Kurang

A. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu
Tahun 2018

MISI I: Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi								
TUJUAN I : Peningkatan populasi dan persebaran industri								
SASARAN STRATEGIS I:								
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
		2014	2015	2016	2017	2018		
Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.9%	6.67%	6.6%	14.27%	7.90%	5.83%	39.12%	Kurang
Nilai Investasi Sektor Industri	176,6%	396,7 Milyar	162,6 Milyar	169,3 Milyar	200,5 Milyar	427 Milyar	228%	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian Sasaran							133.56	Sangat Baik
SASARAN STRATEGIS II:								
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
		2014	2015	2016	2017	2018		
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.3%	6.29%	6.18%	6.21%	6.18%	6.00%	95.23	Baik
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12%	5.82%	6.40%	8.87%	8.50%	5.43%	40.76%	Baik
Rata – Rata Capaian Sasaran							67.99	Cukup
MISI II: Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah								
TUJUAN II.1: Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen								
SASARAN STRATEGIS II.1:								
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri								
Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
		2014	2015	2016	2017	2018		
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	9%	6.99%	7.03%	7.82%	8.69%	7.92%	88	Baik
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.10%	13.42%	13.35%	13.88 %	14.40%	14.85 %	105	Sangat Baik

Rata – Rata Capaian Sasaran							96.5	Baik
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------	------

MISI II: Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah								
TUJUAN II.2: Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor								
SASARAN STRATEGIS II.2:								
Meningkatnya Ekspor Daerah								
Indikator Kinerja Penunjang	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Nilai Ekspor	1.407 Trilyun	1.562 Trilyun	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.898.3 Trilyun	2.218 Trilyun	157	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian Sasaran							157	Sangat Baik

MISI III: Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional								
TUJUAN III: Peningkatan Kualitas Kelembagaan								
SASARAN STRATEGIS III.1:								
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel								
Indikator Kinerja Penunjang	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Nilai SAKIP	BB	B	B	B	B	BB	100	Baik
Rata – Rata Capaian Sasaran							100	Baik

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Misi/Sasaran	Uraian
Misi Pertama	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
Sasaran ke-1	Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Populasi Industri kecil, menengah dan besar diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha IKM dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 133.56 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-1 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori kurang dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat baik.
Sasaran ke-2	Dalam upaya meningkatkan penguatan struktur industri dan peningkatan produktivitas usaha industri diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Capaian kinerja sasaran ke-2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “cukup” dan rata – rata persentase capaian 67.99 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-2 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori “baik” dan 1 (satu) indikator dengan kategori “kurang”.
Misi Kedua	Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
Sasaran ke-3	Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada peningkatan unit usaha perdagangan dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-3 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 96.5 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator, 1 indikator dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori baik.

Sasaran ke-4	Dalam upaya meningkatkan produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Bengkulu diarahkan pada peningkatan nilai ekspor per tahun, peningkatan jumlah eksportir dan penurunan nilai impor Bengkulu. Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor Bengkulu Tahun 2018 sebesar 157% dengan kategori “sangat baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori sangat baik.
Misi Ketiga	Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional
Sasaran ke-5	Dalam upaya meningkatkan manajemen tata kelola OPD diarahkan kepada peningkatan sistem perencanaan yang holistik, tematik, terintegrasi dan berbasis pencapaian kinerja program, kegiatan dan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia per tahun. Capaian kinerja Nilai SAKIP OPD tahun 2018 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik” dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori baik

A.2 Analisa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, terdapat 3 (tiga) misi dan 4 (empat) tujuan, serta 6 (enam) sasaran strategis, adapun analisa dari keempat sasaran strategis untuk mencapai empat tujuan dan empat misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kesatu **“Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri”**

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Peningkatan populasi maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2:
SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018

SASARAN STRATEGIS I :								
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.9%	6.67%	6.6%	14.27%	7.90%	5.83%	39.12%	Kurang
Nilai Investasi Sektor Industri	176,6 Milyar	396,7 Milyar	162,6 Milyar	169,3 Milyar	200,5 Milyar	427 Milyar	228%	Sangat Baik

Tabel 3.3 : Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.9%	5.83%	39.12%
		Nilai Investasi Sektor Industri	176,6 Milyar	427 Milyar	228%

Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.9%	7.90%	5.83%
		Nilai Investasi Sektor Industri	176,6 Milyar	200,5 Milyar	427 Milyar

Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	15.5%	5.83%	39.54%
		Nilai Investasi Sektor Industri	206 Milyar	427 Milyar	228%

Tabel 3.6: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	5.83	4.83%	Pertumbuhan Sektor Industri Bengkulu pada Tahun 2018 sebesar 5.83% dengan total unit usaha industri sebanyak 6.401 Unit usaha dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan sektor industri nasional sebesar 2.07% dari total unit usaha industri nasional sebanyak 309.344 Unit Usaha.
		Nilai Investasi Sektor Industri	228%	4.27%	Nilai Investasi sektor industri Bengkulu pada tahun 2018 mencapai Rp. 427 Milyar dan memberikan kontribusi nilai investasi sektor industri nasional sebesar 0.02% dari nilai investasi nasional yang mencapai Rp. 2.193 Trilyun.

Tabel 3.7: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2018	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	1.580.905.105	12.47%
		Nilai Investasi Sektor Industri		

Tabel 3.8: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.9%	5.83%	39.54 %	1.580.905.105	1.464.044.105	92.60
		Nilai Investasi Sektor Industri	176,6 Milyar	427 Milyar	228%			

Tabel 3.9: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Rata – rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	133,56	92.60	40,96
		Nilai Investasi Sektor Industri			

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

1.1 Indikator Kinerja Utama Pertama “Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun”

Strategi dan Arah kebijakan pembangunan sektor industri dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat
2. Pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang
3. Penguatan Struktur Industri dengan terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri
4. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah.

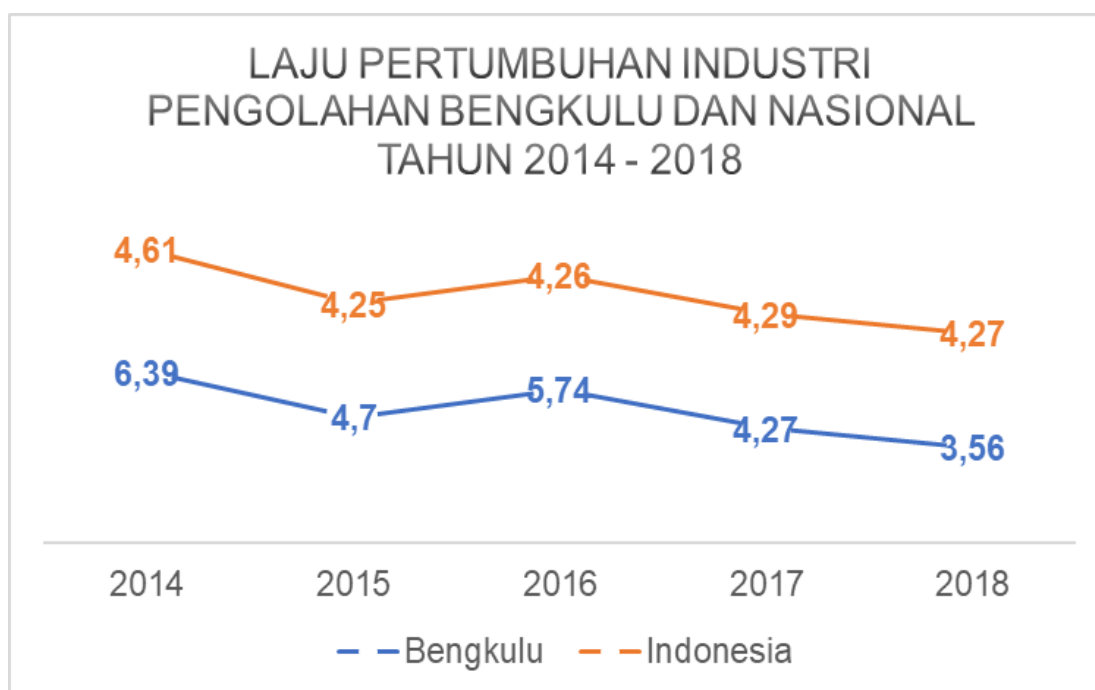
Terkait hal tersebut diatas, berdasarkan kinerja indikator “Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun” didapat hasil bahwa Pertumbuhan sektor industri tahun 2018 tercatat sebesar 5.83 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14.9 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja satu, sehingga persentase capaiannya hanya sebesar 39.12 persen.

Berdasarkan pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas mengindikasikan laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Bengkulu per tahun dan laju pertumbuhan industri, jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan industri sebesar 14,47% dan 7.90% (c-to-c), maka terjadi kecenderungan trend melambat/menurunnya laju pertumbuhan industri di Provinsi Bengkulu. Hal ini terkonfirmasi dari melemahnya kinerja industri pengolahan besar-sedang dan kinerja industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan release Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pada Tanggal 06 Februari 2019, laju pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6.15% jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 6.18% sehingga mengalami perlambatan sebesar 0.02%. Perlambatan sektor industri pengolahan sejalan dengan belum menurunnya kinerja subsektor perkebunan akibat belum membaiknya harga komoditas utama (CPO dan karet) yang menjadi bahan baku industri pengolahan. Pada triwulan III 2018, harga CPO internasional tercatat sebesar US\$ 534,14/kg, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$ 601,11/kg. Sementara harga karet internasional tercatat sebesar US\$ 1,74/kg, menurun dibandingkan sebelumnya sebesar US\$ 1,69/kg pada triwulan II (BI, 2018).

Perlambatan kinerja sektor ini juga tercermin dari menurunnya pertumbuhan realisasi kredit sektor industri pengolahan. Pada triwulan III 2018, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 45,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 71,70% (yoy). Selain itu, penyebab perlambatan lainnya antara lain adalah harga CPO dan karet internasional yang hingga Oktober masih menunjukkan perlambatan. Selain itu, tergerusnya competitive advantages CPO Indonesia oleh produk substitusi (minyak kedelai) dan CPO negara pesaing (Malaysia) menyebabkan sulitnya persaingan di perdagangan internasional.

Kondisi tersebut sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan industri nasional yang berada pada angka 4.27% menurun/melambat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4.27 (y to y).

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional (Non Migas) Tahun 2014 – 2018



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2018

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Nasional, trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu Tahun 2018 berada dibawah pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 hanya mencapai 3.56 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, yaitu sebesar 4,27 persen, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.2 diatas.

Sementara di sisi lain kenaikan unit usaha industri kecil dan menengah pada tahun 2018 hanya sebesar 4.58% dan mengalami perlambatan sebesar 3.32% jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 7.9%, dimana jumlah unit usaha yang tumbuh sekitar 277 unit usaha. Pada tahun 2018, dari 700 calon wirausaha baru yang diberi pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan usaha, hanya 39,57% saja yang tumbuh menjadi wirausaha baru. Masih rendahnya calon wirausaha yang mengurus perijinan usaha industri disebabkan dengan permasalahan modal usaha yang belum tersedia dan masih mengharapkan bantuan mesin/peralatan produksi dari pembina IKM dalam hal ini Pemerintah dan Stakeholder terkait. Ketergantungan yang sangat besar terhadap bantuan pemerintah dan diikuti dengan jiwa kewirausahaan yang belum tangguh menyebabkan calon wirausaha yang sudah dilakukan pembinaan masih belum percaya diri mengurus perijinan usaha industri dan memulai usaha.

1.2 Indikator Kinerja Utama Pertama “Nilai Investasi Sektor Industri”

Dalam hal pencapaian indikator kinerja utama kedua “Nilai Investasi sektor industri” didapat hasil bahwa sektor industri berperan dalam menyumbang perekonomian daerah, tercatat nilai investasi sektor industri tahun 2018 sebesar 427 Milyar, meningkat signifikan sebesar Rp 226.5 Milyar atau 112 persen jika dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 200.5 Milyar. Adapun target indikator nilai investasi sektor industry tahun 2018 adalah sebesar 176.6 Milyar, sehingga capaian untuk indikator ini mencapai 228 persen.

Tingginya peningkatan nilai investasi sektor industri mengindikasikan tingginya realisasi investasi terutama dari sektor industri besar dan sedang di Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Berdasarkan data release dari BKPM RI Tahun 2018, realisasi investasi sektor industri di Provinsi Bengkulu mencapai Rp. 224 Milyar meningkat sebesar 272% jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 60 Milyar. Peningkatan realisasi investasi juga diikuti dengan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) provinsi bengkulu tahun

2018 naik sebesar 11,59 persen, disebabkan oleh pertumbuhan produksi industri makanan sebesar 16,83 persen dan produksi industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 1,27 persen.

Sementara itu, peningkatan nilai investasi sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu hanya tumbuh sebesar 1.42 persen atau sebesar Rp. 2.85 Milyar. Masih kecilnya realisasi investasi sektor industri kecil menengah disebabkan tumbuhnya wirausaha baru tidak diikuti dengan berkembangnya ikm yang ada bahkan beberapa IKM cenderung belum maksimal melakukan produksi karena kendala keterbatasan mesin dan peralatan serta tidak mampu bersaing dengan baik pasar lokal dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang direlease oleh BPS Tahun 2018 didapat hasil bahwa Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Bengkulu (y-on-y) Triwulan IV 2018 hanya sebesar 2,66 persen.

Peningkatan nilai investasi yang sedikit juga terlihat dari aspek penyaluran Kredit UMKM yang menurun pada Tahun 2018. Data Bank Indonesia mencatat bahwa Pada triwulan laporan, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 16,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,06% (yoy). Menurunnya penyaluran kredit UMKM didorong oleh kredit Kecil dan Menengah, Pertumbuhan kredit Kecil melambat menjadi 23,53% (yoy) dari sebelumnya 26,09% (yoy), sedangkan kredit Menengah menjadi 0,94% (yoy) dari sebelumnya 4,16% (yoy). Sementara kredit skala Mikro tumbuh sebesar 18,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 15,68% (yoy). Penurunan suku bunga kredit UMKM skala Mikro dari 10,94% menjadi 10,73% diyakini menjadi faktor meningkatnya penyaluran kinerja kredit tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas mengindikasikan bahwa peningkatan nilai investasi sektor industri kecil dan menengah hanya terjadi dari aspek usaha mikro yang mayoritas merupakan wirausaha baru.

Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1:

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator capaian juga merupakan bentuk dukungan dari berbagai aspek terkait penumbuhan dan pengembangan sektor industri. Namun disisi lain, pencapaian kinerja tersebut harus didukung oleh instansi terkait lainnya untuk turut menunjang hal – hal terkait dengan penumbuhan dan pengembangan sektor industri di Provinsi Bengkulu. Berikut ini realisasi kinerja masing – masing program/kegiatan yang selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Industri Agro

Capaian kinerja sasaran pertama didapat dari realisasi capaian outcome (1) Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang sebanyak 349 persen yang didukung oleh realisasi capaian output (a) Jumlah Unit industri pengolahan non-migas besar sedang sebesar 260 persen (b) Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang RPIP dengan persentase capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dan realisasi capaian outcome (2) Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar sebesar 224 persen dan didukung oleh capaian output (1) Cakupan binaan perusahaan industry besar sedang sebesar 167 persen

b. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

Capaian kinerja sasaran pertama didapat dari realisasi capaian outcome (1) Jumlah Sentra yang dikembangkan sebesar 266 persen dan didukung oleh capaian output (1) Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan sebesar 120 persen (2) Jumlah IKM yang Memperoleh

Pembinaan Melalui Dekranasda sebesar dan Jumlah Produk OVOP yang dikembangkan sebanyak 3 Produk.

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Capaian kinerja sasaran pertama didapat dari realisasi capaian outcome (1) Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil sebesar 50% yang didukung oleh capaian output (1) Jumlah Unit Usaha Baru Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang & Aneka Kerajinan sebesar 101 persen (2) Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang & Aneka Kerajinan sebesar 343 persen.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah sentra industri yang dibina dalam gerakan pemberdayaan industri. Jumlah sentra industri yang dibina pada tahun 2018 sejumlah 8 kawasan. Ketujuh kawasan tersebut adalah (1) sentra kampung nelayan di Desa Bantal, Kab. Muko Muko, Desa Pasar Bawah di Kab. Bengkulu Selatan dan Desa Pasar Lama, Kab. Kaur. (2) sentra OVOP Jeruk Gerga, di Kabupaten Lebong, Sentra OVOP Gula Aren di Kab. Rejang Lebong dan Sentra Kalamansi di Kota Bengkulu, (3) Sentra Tenun di Desa Masmambang dan Desa Kampai, Kab. Seluma.
- b. Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan. Diharapkan melalui pembinaan yang merata ini dapat mendorong persebaran pengembangan industri di Provinsi Bengkulu terutama IKM dan industri unggulan Provinsi Bengkulu kedepan.
- c. Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi. Industri unggulan Provinsi Bengkulu yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, yaitu:
 - Industri pengolahan sawit
 - Industri pengolahan karet
 - Industri pengolahan hasil laut dan perikanan
 - Industri pengolahan hasil tanaman pangan

Namun dengan terbatasnya ketersediaan anggaran pada tahun 2018, fasilitasi hilirisasi industri Provinsi Bengkulu difokuskan pada industri karet dan industri hilir CPO dengan tetap memperhatikan industri unggulan lainnya.

- d. Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi. Diharapkan dengan disahkannya PERDA RPIP Bengkulu 2017-2037, dapat dilanjutkan dengan penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Industri yang membuka peluang tumbuh kembangkan hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;

- e. Dukungan pengembangan Kawasan Terpadu Dekranasda Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor industri kerajinan daerah dan mendorong DEKRANASDA untuk memfasilitasi pemasaran dari industri kerajinan daerah, pada tahun 2018 telah dilaksanakan launching/peresmian kawasan terpadu Dekranasda sebagai sentra kerajinan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi showroom produk kerajinan daerah dari 10 Kab/Kota. Kawasan ini juga merupakan sentra kerajinan yang disiapkan sebagai salah satu destinasi wisata 2020.

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-1 diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri Provinsi Bengkulu dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;
- b. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu
- c. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- d. Beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertambahan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
- b. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
- c. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
- d. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung pencapaian Sasaran ke-1 :

Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ke-1 melalui 3 (tiga) Program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Agro

- 2. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial
- 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.580.905.105 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.464.044.105 atau 92.60 persen. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92.60 persen dan capaian realisasi kinerja sasaran ke-1 sebesar 133,56 persen, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayannya sebesar 40,96 persen.

2. Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri”

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Peningkatan populasi dan persebaran industri, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu Meningkatkan Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10:

SASARAN STRATEGIS 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018

SASARAN STRATEGIS II:								
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.3%	6.29%	6.18%	6.21%	6.18%	6.15%	97.61	Baik
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12%	5.82%	6.40%	8.87%	8.50%	5.43%	40.76%	Baik

Tabel 3.11: Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.3%	6.15%	97.61
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12%	5.43%	40.76%

Tabel 3.12: Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.3%	6.18%	6.15%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12%	8.50%	5.43%

Tabel 3.13: Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7.00%	6.15%	87.85 %
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	13%	5.43%	40.76%

Tabel 3.14: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.15 %	19.86%	Kontribusi sektor industri Bengkulu Tahun 2018 terhadap PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 2.7 Trilyun, dan memberikan kontribusi sebesar 0.12% terhadap Kontribusi Industri Nasional terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp. 2.193 Trilyun
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	5.43%	2.08%	Penyerapan tenaga kerja sektor industry Bengkulu sebesar 18.572 Orang dengan persentase pertumbuhan sebesar 5.43% dan memberi kontribusi terhadap nasional sebesar 0.10% terhadap penyerapan tenaga kerja industry nasional sebanyak 17.9 Juta Orang.

Tabel 3.15: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2018	% Anggaran
1	2	3	4	5

2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1.580.905.105	12.47%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri		

Tabel 3.16: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.3%	6.00%	95.23	1.580.905.105	1.464.044.105	92.60
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12%	9.9%	82.50			

Tabel 3.17: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	67.99	80.76%	-12.77%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri			

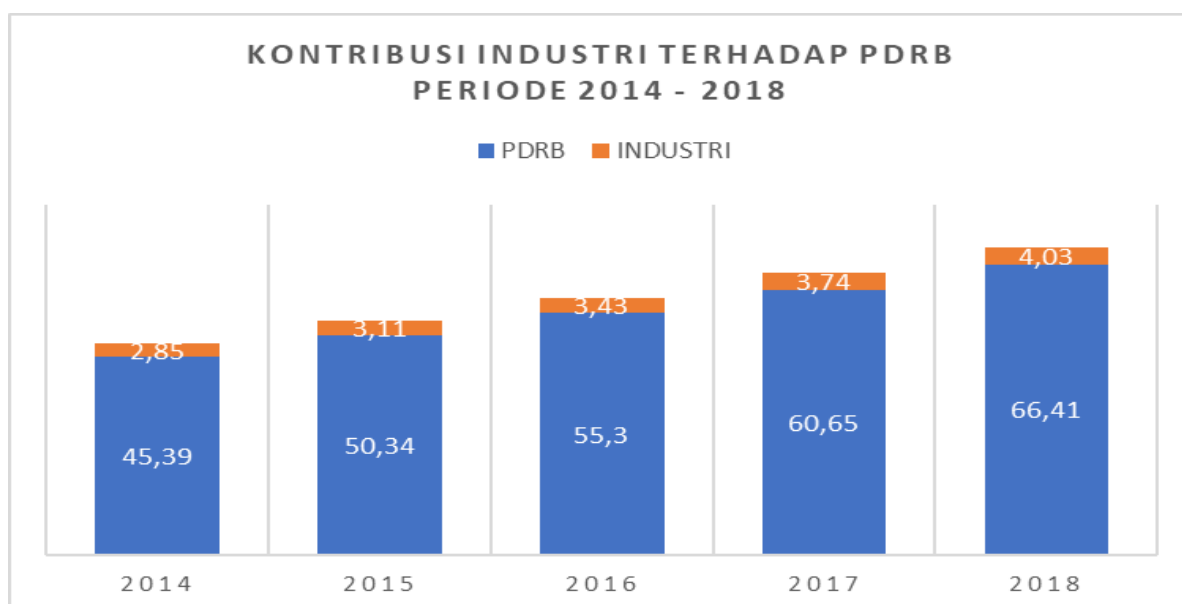
Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

2.1 Indikator Kinerja Utama Kedua “Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB”

Berdasarkan kinerja indikator “ Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB” didapat hasil bahwa Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.03 trilyun atau sebesar 6.15 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 66.41 trilyun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 6.30 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kedua, sehingga persentase capaiannya hanya sebesar 97.61 persen.

Meskipun pencapaian kinerja masih lebih rendah dari target yang ditetapkan, secara makro Kinerja Sektor Industri pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 294 Milyar atau meningkat 7.87 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai nilai Rp 3.4 trilyun.

Grafik 3.1 Kontribusi Industri Terhadap PDRB Periode 2014-2018



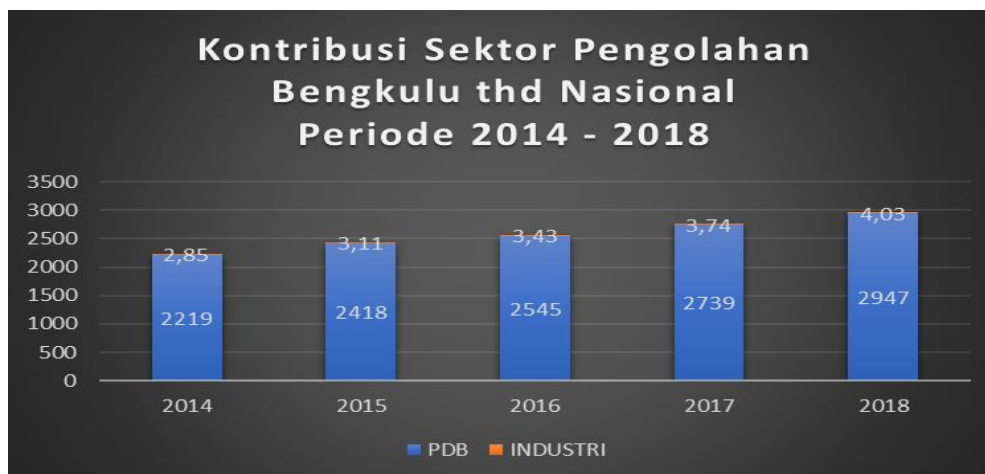
Sumber data: BPS, 2018

Meskipun sektor industri mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun secara umum sektor industri masih mengalami perlambatan. Berdasarkan data releasa Bank Indonesia, pada Triwulan III Tahun 2018, di sisi penawaran, perlambatan ekonomi terutama didorong oleh sektor-sektor utama, seperti: Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; dan sektor Industri Pengolahan. Selama tahun 2018, kinerja sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,62% (yoy).

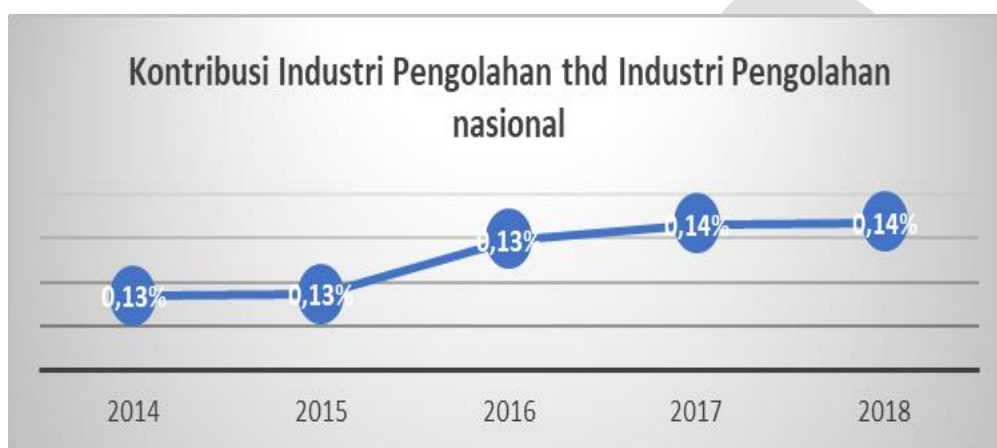
Perlambatan tersebut sejalan dengan belum menurunnya kinerja subsektor perkebunan akibat belum membaiknya harga komoditas utama (CPO dan karet) yang menjadi bahan baku industri pengolahan. Pada triwulan III 2018, harga CPO internasional tercatat sebesar US\$ 534,14/kg, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$ 601,11/kg. Sementara harga karet internasional tercatat sebesar US\$ 1,74/kg, menurun dibandingkan sebelumnya sebesar US\$ 1,69/kg pada triwulan II. Perlambatan kinerja sektor ini juga tercermin dari menurunnya pertumbuhan realisasi kredit sektor industri pengolahan. Pada triwulan III 2018, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 45,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 71,70% (yoy).

Perlambatan kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan berlanjut pada triwulan IV 2018. Faktor penyebabnya antara lain adalah harga CPO dan karet internasional yang hingga Oktober masih menunjukkan perlambatan. Selain itu, tergerusnya competitive advantages CPO Indonesia oleh produk substitusi (minyak kedelai) dan CPO negara pesaing (Malaysia) menyebabkan sulitnya persaingan di perdagangan internasional.

Grafik 3.2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Thd Nasional Th 2014 – 2018 (Dalam Trilyun)



Sumber : BPS, Tahun 2018



Berdasarkan data BPS atas harga berlaku secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mencapai Rp 4.03 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0.14 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 2.947 trilyun pada tahun 2018, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik diatas Industri pengolahan Bengkulu Tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 7.89 persen bila dibandingkan Tahun 2017.

2.2 Indikator Kinerja Utama Pertama “Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri”

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja industri yang merupakan jumlah kumulatif tenaga kerja yang terserap di sektor industry pengolahan non migas sampai dengan tahun 2018. Sektor industry diharapkan menjadi leading sektor yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja di sektor industry dihitung menggunakan data sakerna. Sampai dengan tahun 2018 tenaga kerja sektor industry pengolahan non migas mencapai 18.572 orang dengan persentasi peningkatan tenaga kerja industry sebesar 5.43% jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya menyerap 17.794 Orang. Namun apabila dibanding dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 8.5%, peningkatan tenaga kerja industri mengalami perlambatan seiring dengan melambatnya kinerja sektor industri di Provinsi Bengkulu.

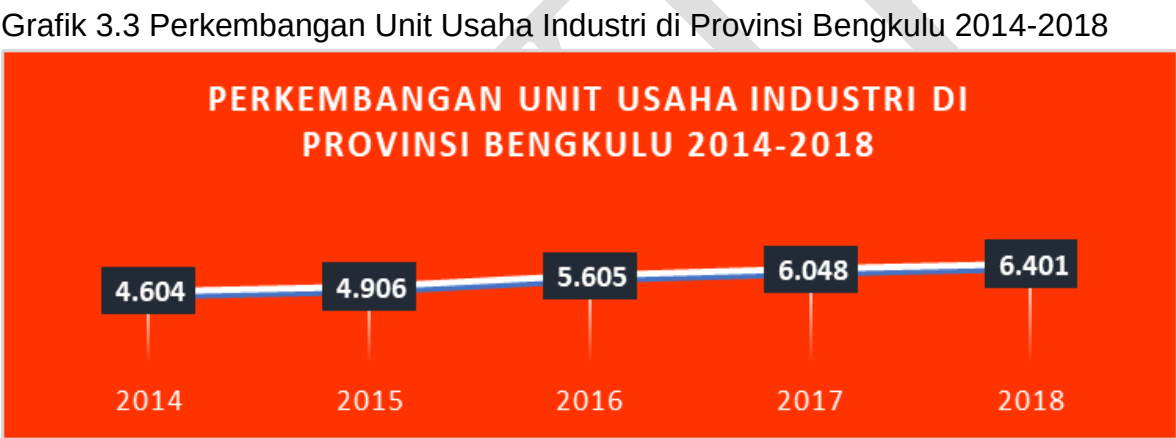
Meskipun penyerapan tenaga kerja sektor industri mengalami perlambatan, namun secara keseluruhan tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Selama tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2018 sebesar 3,51%, menurun dibandingkan Agustus 2017 yang tercatat sebesar 3,70%. Namun demikian perbaikan yang terjadi masih terbatas, hal ini seiring dengan harga

komoditas yang masih stagnan. Jumlah penduduk bekerja di Bengkulu tercatat sebesar 963.463 orang dengan komposisi terbesar berada pada sektor Pertanian (49,27%) kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (15,76%).

Apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi kenaikan pangsa penduduk yang bekerja di sektor Pertanian yang diyakini sebagai membaiknya produksi pertanian tanaman pangan yang didukung cuaca dan musim yang kondusif meskipun disisi lain perkembangan sub sektor perkebunan belum menunjukkan optimisme. Dibandingkan kondisi Agustus 2017, telah terjadi pergeseran komposisi jumlah penduduk yang bekerja di sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor konstruksi menuju sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dilihat dari kualitas pendidikannya, mayoritas tenaga kerja di Bengkulu masih terkonsentrasi pada level Sekolah Dasar (39.5%) dan Sekolah Menengah Pertama (20.47%). Hal ini searah dengan komposisi jumlah tenaga kerja yang mayoritas terserap di sektor primer. Berdasarkan jenis pekerjaannya sebanyak 28,31% terkonsentrasi sebagai buruh/karyawan.

Terkait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Provinsi Bengkulu baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2018



Perkembangan Jumlah Unit Usaha untuk skala IKM dari tahun 2017 sebanyak 6.048 Unit Usaha meningkat sebesar 5.84 persen atau 354 Unit Usaha menjadi 6.401 Unit Usaha di tahun 2018.

Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Bengkulu Th 2014- 2018



Untuk IKM perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2018 sebanyak 17.794 orang meningkat sebesar 4.37 persen atau 778 orang menjadi 18.572 orang di tahun 2018.

Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Ke-2

Dalam rangka mencapai keberhasilan dari indikator “Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB” dan “Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri” diperlukan dukungan kerjasama antar pihak. Berikut ini realisasi kinerja masing-masing program/kegiatan yang selengkapnyanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Agro

Capaian kinerja sasaran kedua didapat dari realisasi capaian outcome (1) Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang sebesar 224 Milyar yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar sebesar 224 Milyar atau 224% dari target yang ditetapkan sebesar 100 Milyar dan realisasi capaian outcome (2) Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Cakupan pemantauan dan pengawasan perusahaan industri besar sedang sebanyak 50 Perusahaan industri atau 167% dari target yang ditetapkan.

2. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial

Capaian kinerja sasaran kedua dari realisasi capaian outcome (2) Nilai Investasi Sektor Industri Kecil sebesar 202,9 Milyar yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang & Aneka Kerajinan sebesar 102,9 Milyar (2) Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Elektronik, Alat Angkut & Sumber Daya Industri sebesar 100 Milyar (3) Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sentra OVOP sebanyak 3 sentra yaitu Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

3. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Capaian kinerja sasaran kedua didapat dari realisasi capaian outcome (1) Nilai Investasi Sektor Industri Kecil sebesar 202,9 Milyar atau 115 persen yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan, Kimia, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang & Aneka Kerajinan sebesar 102,9 Milyar atau 206 persen dan (2) Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, Mesin, Elektronik, Alat Angkut & Sumber Daya Industri sebesar 100 Milyar atau 380% atau dan (3) Jumlah IKM yang Difasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk sebanyak 64 IKM atau 640%.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-2 diantaranya sebagai berikut:

a. Bertambahnya unit usaha industri yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Jumlah unit usaha berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri. Dilaksanakannya strategi penumbuhan dan pengembangan calon wirausaha menjadi wirausaha baru dalam rangka menumbuh-kembangkan unit usaha baru industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu yang kemudian diharapkan dapat mengurangi pengangguran di Provinsi Bengkulu melalui sektor industri. Semakin banyak jumlah unit usaha, maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu industri. Pentingnya sektor industri di Provinsi Bengkulu terefleksi antara lain dari jumlah usahanya yang sangat banyak jauh melebihi jumlah unit usaha dari kelompok industri.

Pada tahun 2018, baik sektor industri besar sedang dan sektor industri kecil menengah mengalami penambahan unit usaha dengan total unit usaha sebanyak 6.401 Unit usaha, bertambah sebanyak 353 unit usaha industri tumbuh. Penambahan unit usaha industri didapat dari penerbitan Izin usaha industri besar sedang dan izin usaha mikro

kecil dan menengah pada tahun 2018. Penambahan unit usaha diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri yang tercatat sebanyak 18.572 Tenaga Kerja ditahun 2018. Beberapa program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dilaksanakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan kepada 700 wirausahawan ditahun 2018. Selain itu juga mendorong lahirnya wirausaha baru di 3 titik kampung nelayan melalui pelatihan usaha pengolahan produk makanan berbahan dasar ikan kepada 60 calon wirausaha baru dari sentra kampung nelayan sejahtera di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

b. Meningkatnya realisasi investasi industri besar sedang di Provinsi Bengkulu

Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang artinya semakin besar Investasi yang diterima maka semakin besar pula penyerapan tenaga kerja. Pertama investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lainnya.

Berdasarkan data capaian “Nilai Investasi Sektor Industri” Tahun 2018, terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 427 Milyar jika dibanding Tahun 2017 yang hanya sebesar 200 Milyar. Atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 227 Milyar (113 persen) pada tahun 2018. Tingginya peningkatan realisasi investasi terjadi pada sektor usaha besar sedang di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. 224 Milyar di Tahun 2018. Sedangkan untuk industri kecil dan menengah hanya mengalami peningkatan yang relatif kecil sebesar 2 milyar dari 200 milyar menjadi 202 milyar di tahun 2018. Meningkatnya realisasi investasi sektor industri besar sedang dipengaruhi oleh unit usaha yang telah mendapatkan ijin prinsip penanaman modal 3 (tiga) tahun terakhir memulai pelaksanaan investasinya di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, pada tahun 2018 juga dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan perusahaan industri besar sedang dengan cakupan 50 perusahaan Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan industri besar binaan menghasilkan data perkembangan perusahaan industri besar sedang di Provinsi Bengkulu sebanyak 1 (satu) dokumen direktori perusahaan besar sedang di Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

c. Peningkatan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja

Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung pada tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut.

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan di industri. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pembinaan kepada sentra – sentra industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu tahun 2018, didapatkan peningkatan nilai produksi usaha industri kecil menengah sebesar Rp. 677 Milyar atau meningkat sebesar 2,38 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 658 Milyar rupiah. Dengan nilai bahan baku mencapai Rp. 273 Milyar di Tahun 2018.

Upaya pemuktahiran data industri kecil menengah dan industri besar sedang pada tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menyajikan kinerja industri tahun 2018. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunan data perkembangan industri terus dilaksanakan dalam rangka menyajikan data perkembangan yang sesuai dengan perkembangan industri daerah tahun 2018.

- e. Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan.

Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi. Diharapkan dengan disahkannya PERDA RPIP Bengkulu 2017-2037, dapat dilanjutkan dengan penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Industri yang membuka peluang tumbuh kembangkan hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-2 diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya penyajian data perkembangan realisasi investasi dan realisasi produksi sektor besar – sedang dikarenakan masih belum adanya kesadaran perusahaan melaporkan perkembangan realisasi usaha dan nilai produksi yang menjadi salah satu indikator peningkatan nilai investasi sektor industri di Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan pendataan yang dilakukan aparatur kabupaten/kota masih belum menyajikan data secara menyeluruh;
- b. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM karena tidak tersedianya anggaran dalam pemuktahiran data IKM, sehingga pemuktahiran data masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat;
- c. Belum tersedianya sistem atau instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama;
- d. Beberapa unit usaha ditemukan vakum produksi artinya tidak ditemukan proses produksi akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitor baru sehingga mempengaruhi peningkatan unit usaha dan peningkatan realisasi investasi. Adapun peningkatan unit usaha dan realisasi investasi hanya terjadi pada wirausaha baru yang tumbuh pada tahun 2018.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemuktahiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.

- b. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk Kabupaten/Kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra – sentra yang vakum atau berhenti produksi untuk kemudian difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal dan bantuan peralatan/mesin;
- c. Melakukan pembinaan dari aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk maju dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar;

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung pencapaian Sasaran ke-2:

Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ke-1 melalui 3 (tiga) Program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Agro
2. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.580.905.105 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.464.044.105 atau 92.60 persen. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 80.76 persen dan capaian realisasi kinerja sasaran ke-1 sebesar 67.99 persen, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayannya sebesar -12.77 persen.

3. Sasaran Strategis Ketiga “Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri”

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan Kedua yang Pertama, yaitu Meningkatkan kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri. Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.18 :
SASARAN STRATEGIS 3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018

SASARAN STRATEGIS III :								
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	9%	6.99%	7.03%	7.82%	8.69%	7.92%	88	Baik
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.10%	13.42%	13.35%	13.88%	14.40%	14.85%	105	Sangat Baik

Tabel 3.19 : Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	9%	7.92%	88
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.10%	14.85%	105

Tabel 3.20 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	9%	8.69%	7.92%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.10%	14.40%	14.85%

Tabel 3.13 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	10.00%	7.92%	86.9%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	15.00%	14.85%	96%

Tabel 3.14 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	7.92%	4.97%	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Bengkulu Tahun 2018 Rp. 9.8 Trilyun, memberikan kontribusi sebesar 0.5 persen terhadap PDB ADHB Nasional yang mencapai sebesar Rp. 1.931 Trilyun
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.58%	13.02%	Nilai PDB ADHB sektor Perdagangan Nasional tahun 2018 mencapai Rp 1.931 trilyun memberikan kontribusi sebesar 13.02 persen terhadap Total PDB ADHB nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 14.837 trilyun pada tahun 2018. Sedangkan Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu berkontribusi sebesar 14.58 % dari total PDRB ADHB daerah yang mencapai nilai sebesar Rp. 66,4 Trilyun

Tabel 3.15: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2018	% Anggaran
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	484.105.000	3,8%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB		

Tabel 3.16: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.00%	8.69%	108.63%	484.105.000	394.598.700	81.51%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88%	14.40%	102.86%			

Tabel 3.17: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	96,5%	81,51%	14.99%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB			

Analisa atas capaian indikator – indikator sasaran ketiga adalah sebagai berikut:

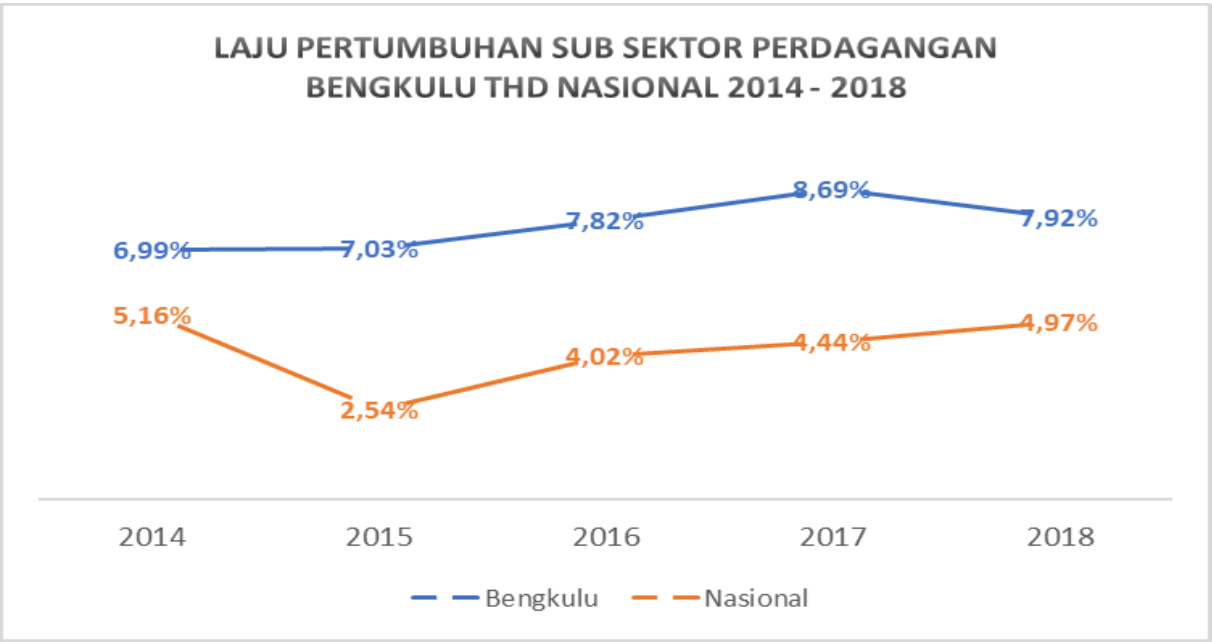
3.1 Indikator Kinerja Utama Pertama “Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri”

Pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2018 tercatat sebesar 7.92 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 9.00 persen, sebagaimana pada sasaran strategis tiga, indikator kinerja satu yaitu persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan, sehingga persentase capaiannya sebesar 88 persen.

Pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu selama tahun 2014-2018 Bengkulu mengalami trend meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 6.99 %, kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 6.99 %, berada pada titik terendah dan tahun 2015 pertumbuhan sebesar 7.03 %. Sedangkan tahun 2016 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 7.82 %. Pertumbuhan sub sektor perdagangan yang tumbuh melambat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan adanya krisis global yang berdampak pada daya jual beli masyarakat. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 8.69 % jauh melampaui pertumbuhan sub sektor perdagangan nasional yang mencapai 4.44 %, namun ditahun 2018 berfluktuasi dan melambat menjadi 7.92%. Trend pertumbuhan sub sektor perdagangan

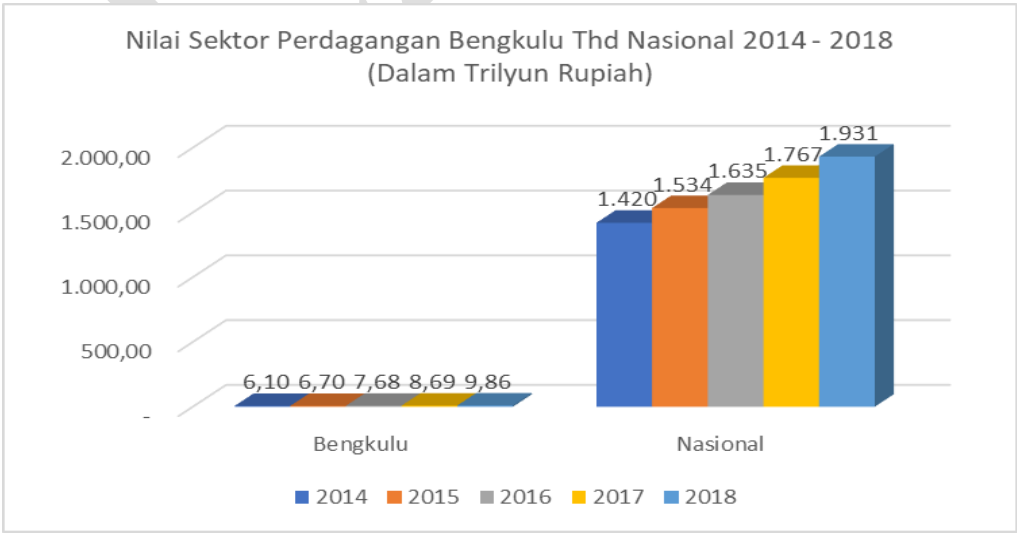
Bengkulu hampir selalu melampaui trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Nasional seperti diilustrasikan dalam grafik 3.7.

Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan antara Bengkulu dibandingkan terhadap nasional tahun 2014-2018



Nilai PDB ADHB sektor Perdagangan Nasional tahun 2018 mencapai Rp 1.931 trilyun memberikan kontribusi sebesar 13.02 persen terhadap Total PDB ADHB nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 14.837 trilyun pada tahun 2018. Sedangkan Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu berkontribusi sebesar 14.58 % dari total PDRB ADHB daerah yang mencapai nilai sebesar Rp. 66,4 Trilyun.

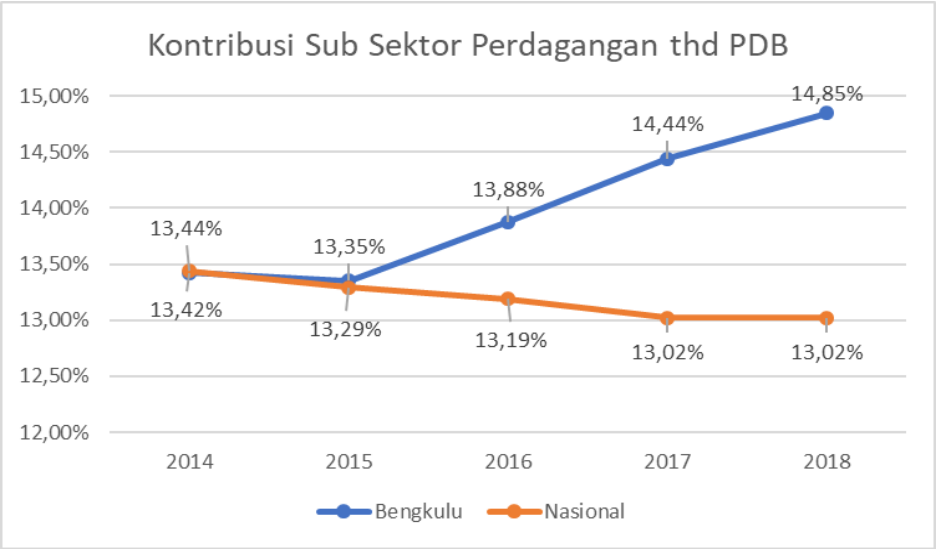
Grafik 3.8 Nilai Sektor Perdagangan Bengkulu Thd Nasional



Sumber: BPS, 2018

3.2 Indikator Kinerja Utama Kedua “Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB”

Grafik 3.9 Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap PRDB 2014 – 2018



Sumber data : BPS, 2018

Berdasarkan grafik 3.9 tersebut diatas, trend kontribusi sub sektor perdagangan Provinsi Bengkulu meningkat diatas rata – rata nasional yang cenderung mengalami penurunan sebesar 13,02 persen di tahun 2018. Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB ADHB Bengkulu Tahun 2018 ditetapkan sebesar 14,85 persen, realisasinya melampaui target, yaitu sebesar 14.10 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran strategis keempat, indikator kinerja kedua ini adalah sebesar 105%. Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Bengkulu pada tahun 2013-2018 berkisar pada angka 13 - 14 persen. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Bengkulu tahun 2019 mencapai Rp 9.8 trilyun memberikan kontribusi sebesar 14.85 persen terhadap Total PDRB ADHB Bengkulu yang mencapai nilai sebesar Rp 66 trilyun pada tahun 2018.

Secara keseluruhan sektor perdagangan masih menjadi satu dari tiga sektor yang mendominasi struktur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2018 bersama pertanian dan administrasi pemerintahan. Besaran peranan ketiga lapangan usaha ini yaitu masing-masing, pertanian sebesar 28,65 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 14,85 persen dan administrasi pemerintahan sebesar 10,01 persen. Sektor perdagangan juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2018 tertinggi sebesar 1,22 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,90 persen diikuti administrasi pemerintahan sebesar 0,55 persen. Sementara yang terendah adalah jasa keuangan sebesar -0,01 persen.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada Tahun 2018, Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 8,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,82% (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya kegiatan perdagangan dalam memenuhi ekspektasi konsumsi masyarakat yang masih tinggi pada periode tahun ajaran baru dan perayaan Idul Adha 1439 H. Selain itu, meningkatnya kegiatan perdagangan juga dipengaruhi oleh perdagangan komoditas hortikultura yang melimpah serta pelaksanaan beberapa event nasional dan daerah di Provinsi Bengkulu (Festival Tabot, Kompetisi Sains Madrasah, dan Bengkulu Expo).

Membaiknya pertumbuhan sektor perdagangan sejalan dengan kenaikan penyaluran kredit pada sektor ini. Pada triwulan III 2018, kredit pada sektor perdagangan tumbuh sebesar 55,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebesar 13,23% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan perdagangan otomotif yang merupakan indikator kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut diindikasikan dari data pendaftaran kendaraan

baru di Provinsi Bengkulu, khususnya kendaraan roda empat. Pada triwulan III 2018, kendaraan roda empat tumbuh sebesar 7,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,82% (yoy).

Pada triwulan IV 2018, kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan tetap tumbuh namun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Tetap tumbuhnya sektor perdagangan didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumsi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sejalan dengan Hasil SK per Oktober 2018 yang mencatatkan kenaikan IKK sebesar 101,11, lebih tinggi daripada triwulan III 2018 sebesar 94,86. Namun demikian, pertumbuhan sektor perdagangan tertahan oleh potensi menurunnya kinerja perdagangan besar seiring perkembangan subsektor perkebunan (kelapa sawit dan karet) yang melambat karena tekanan harga. Selain itu, berkurangnya aktivitas perdagangan produk hortikultura akibat perubahan musim (musim hujan) diyakini ikut mempengaruhi perlambatan kinerja sektor ini.

Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3:

Dalam mencapai keberhasilan dari indikator sasaran ketiga didukung oleh realisasi kinerja masing – masing program/kegiatan yang selengkapny dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Capaian kinerja sasaran ke-3 didapat dari:

Realisasi capaian outcome (1) Persentase peningkatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 38% dengan persentase capaian kinerja sebesar 384% yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 100 pedagang dengan persentase capaian kinerja sebesar 200% (2) Jumlah Dokumen Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok sebanyak 1 Dokumen dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi capaian outcome (2) Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja sebesar 94% yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang/Jasa sebanyak 2 kali dengan capaian 100% (2) Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan sebanyak 80% atau capaian kinerja sebesar 94%.

Realisasi capaian outcome (3) Cakupan Pengawasan Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) sebanyak 2 (dua) kab/kota yang didukung oleh capaian output (1) Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2) sebanyak 4 kali dengan persentase capaian 200%.

Realisasi capaian outcome (4) Penyelesaian Sengketa Konsumen sebanyak 4 fasilitasi dengan pencapaian kinerja sebesar 200% yang didukung oleh pencapaian output (1) Jumlah Penyelesaian Sengketa melalui Operasionalisasi BPSK dengan total fasilitasi sebanyak 4 kali dan persentase capaian sebesar 200%.

- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Capaian kinerja sasaran ke-3 didapat dari:

Realisasi capaian outcome (1) Persentase peningkatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 38% atau persentase capaian sebesar 384% yang didukung oleh realisasi capaian output (1) Pertumbuhan Omset pedagang pasar rakyat Tipe B sebesar 36,31% atau persentase capaian sebesar 182% (2) Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali dengan persentase capaian sebesar 120% (3) Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok sebanyak 4 kali dengan persentase

capaian sebesar 100% dan (4) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian 100%.

Realisasi capaian outcome (1) Jumlah Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian 100% yang didukung oleh pencapaian output (1) Jumlah Dokumen Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian 100% (2) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian 100%.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-3 diantaranya sebagai berikut:

- a. Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.

Merupakan kegiatan yang dirancang dan dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Melalui kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakatnya yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Beberapa komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, sirup, mentega, tepung guludan kacang tanah. Selain itu juga pada beberapa lokasi beberapa komoditi lain yang diperlukan oleh masyarakat, seperti kacang atom, kacang medan, telur, dan beberapa barang kebutuhan masyarakat lainnya.

- b. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan/ memperoleh informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya. Ketersediaan informasi dan data tentang stok tersebut sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang sehingga stabilitas harga barang-barang tersebut dapat terjaga. Selain itu dengan adanya informasi dan data mengenai ketersediaan stok bahan kebutuhan dan barang strategis lainnya akan menjadi salah satu bahan/dasar dalam menyusun/ mengambil kebijakan untuk menekan serta mencegah terjadinya lonjakan inflasi di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018, pemantauan stok bahan kebutuhan pokok difokuskan pada beberapa komoditi, antara lain beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, susu kental manis, tepung terigu, kacang kedelai. Sedangkan untuk barang strategis lainnya yang dilakukan pemantauan stok adalah Semen. Untuk memperoleh informasi dan data tentang stok sembako dan barang strategis lainnya dilakukan melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan beberapa perusahaan/distributor yang ada di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Melalui kegiatan Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis juga dilaksanakan rapat/pertemuan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait guna membahas hal-hal yang

terkait dengan kondisi ketersediaan, harga dan hal-hal lain yang terkait dengan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Provinsi Bengkulu

- c. Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk dalam negeri dan penyelenggaraan Bengkulu Expo setiap tahun.

Produk yang dipromosikan dalam Negeri, yaitu melalui Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi UMKM yang potensial di Bengkulu dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkannya sehingga diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran yang akan berdampak pada semakin berkembangnya UMKM-UMKM potensial di Provinsi Bengkulu, seperti memberikan akses pasar dan promosi produk UKM unggul dalam menghasilkan produk berkualitas, bermutu, membangun merk sendiri, meningkatkan jejaring pemasaran antar peserta sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun pasar global.

Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall 1, Tangerang Selatan (Banten) dimana dalam penyelenggaraannya kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Dan melalui penyelenggaraan Bengkulu Expo yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali pada ulang tahun Provinsi Bengkulu.

- d. Pelaksanaan Monitoring dan pembinaan pasar secara berkala;

Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang up to date mengenai kondisi dan perkembangan sarana distribusi perdagangan (seperti pasar tradisional, pasar modern dan gudang) serta untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan bantuan pembiayaan untuk pembangunan maupun revitalisasi/renovasi pasar tradisional kepada Pemerintah Pusat sekaligus melakukan pemantauan/monitoring perkembangan pemanfaatan alokasi DAK dan Tugas Pembantuan bidang sarana perdagangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

- e. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan pasar tradisional/pasar rakyat dan pembangunan sarana kemetrollogian pada beberapa kabupaten/kota. Untuk tahun 2018, terdapat 28 pasar yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/kota yang difasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan dana DAK Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Kab. Bengkulu Selatan, dengan total dana DAK sebesar Rp. 5.443.000.000,- dan diperuntukan untuk 5 (lima) pasar sebagai berikut:
 - Pasar Nanjungan Desa Nanjungan Kec. Pino Raya
 - Pasar Tungkal Desa Tungkal II Kec. Pinang Raya
 - Pasar Palak Padang Desa Sukaraja Kec. Seginim
 - Pasar Lubuk Tapi Desa Lubuk Tapi Kec. Ulu Manna
 - Pasar Kayu Kunyit Kel. Kayu Kunyit Kec. Manna
2. Kab. Rejang Lebong, dengan total dana DAK sebesar Rp. 5.711.000.000,- dan diperuntukan untuk 5 (lima) pasar sebagai berikut:
 - Pasar Kampung Melayu Kec Bermani Ulu
 - Pasar Transad Kec Bermani Ulu Raya

- Pasar Jumat Kec Bermani Ulu Raya
 - Pasar Desa Sindang Jati Kec Sindang Kelingi
 - Pasar Kota Padang Kec Kota Padang
3. Kab. Kaur, dengan total dana DAK sebesar Rp. 5.498.000.000,- dan diperuntukan untuk 5 (lima) pasar sebagai berikut:
- Pasar Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal
 - Pasar Padang Guci Hulu Kecamatan Padang Guci Hulu
 - Pasar Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay
 - Pasar Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung
 - Pasar Padang Guci Hilir Kecamatan Padang Guci Hilir
4. Kab. Mukomuko, dengan total dana DAK sebesar Rp. 6.244.000.000,- dan diperuntukan untuk 5 (lima) pasar sebagai berikut:
- Pasar Desa Gajah Mati Kec Sungai Rumbai
 - Pasar Desa Lubuk Mukti Kec Penarik
 - Pasar Desa Lubuk Sanai 3 Kec XIV Koto
 - Pasar Desa Tunggang Kec Pondok Suguh
 - Pasar Desa Talang Arah kec. Malin Deman
5. Kab. Kepahiang, dengan total dana DAK sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan diperuntukan untuk 3 (tiga) pasar sebagai berikut:
- Pasar Kabawetan Kel Tangsi Baru Kec Kabawetan
 - Pasar Air Selimang Desa Air Selimang Kec Seberang Musi
 - Pasar babatan Desa TL Babatan Kec Seberang Musi
6. Kab. Bengkulu Tengah, dengan total dana DAK sebesar Rp. 5.552.000.000,- dan diperuntukan untuk 5 (lima) pasar sebagai berikut:
- Pasar Talang Pauh Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa
 - Pasar Taba Penanjung Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung
 - Pasar Renah Kandis kec pagarjati,
 - Pasar Talang Donok kec. Bang Haji
 - Pasar Plajau Kec. Karang Tinggi
- f. Melaksanakan rekapitulasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan inventarisasi/pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan yang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota;
- g. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.

Selain pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu juga melaksanakan pembinaan kepada para

pedagang/pelaku usaha dengan memberikan masukan sekaligus informasi mengenai barang-barang yang layak dan tidak layak untuk dijual sehingga kepentingan konsumen dan produsen sama-sama terlindungi. Kegiatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat dilakukan melalui pengawasan secara kasat mata yang dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu, yaitu pada hari-hari biasa dan saat menyambut hari besar keagamaan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pembelian sampel barang/produk untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium pengujian yang telah terakreditasi.

- h. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan, Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang dalam Pengawasan Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk menjaga ketertiban perdagangan barang-barang yang penting untuk kehidupan perekonomian, khususnya terhadap beberapa barang/ produk yang telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan seperti gula, minuman beralkohol, bahan berbahaya dan pupuk bersubsidi. Kegiatan ini merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dari barang-barang yang beredar di masyarakat.

- i. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi

Sebagai upaya pembinaan terhadap BPSK yang telah terbentuk sebelum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK Muko Muko untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya terhadap Kabupaten yang belum membentuk BPSK, maka melalui kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen ini didorong dan difasilitasi untuk segera membentuk BPSK.

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-3 diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target Jumlah BPSK yang terbentuk disebabkan oleh tidak dapat dilaksanakannya Pembentukan BPSK di Kab/Kota melalui Keputusan Presiden. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perekrutan anggota dan sekretariat BPSK yang baru maupun BPSK yang telah habis masa berlakunya. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sub urusan perlindungan konsumen sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka terhitung sejak 2 Oktober 2016 segala kegiatan yang terkait dengan perlindungan konsumen tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengangkatan, pemberhentian, pembinaan serta pembiayaan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten/kota. Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan masih mempersiapkan peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang mekanisme serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen oleh Pemerintah Provinsi.

2. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya
3. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data di anggaran karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan informasi dan hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa secara umum pelaksanaan penerbitan SIUP, TDP maupun TDG pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu telah dilimpahkan/dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan perizinan/pelayanan terpadu, baik yang berdiri sendiri dalam bentuk Kantor Pelayanan Perizinan maupun yang menjadi bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan adanya pelimpahan tersebut semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh perizinan yang diperlukan. Namun demikian, di sisi lain juga muncul persoalan baru yang terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.
4. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Sebagai upaya untuk terus menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, maka Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
2. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya;
3. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran

perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu

- 4. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/keompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh para petani/keompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Provinsi Bengkulu.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung pencapaian Sasaran ke-3:

Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ke-1 melalui 2 (dua) Program yaitu sebagai berikut:

- 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dengan total anggaran sebesar Rp. 484.105.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 394.598.700 atau 81,51% persen. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 81,51 persen dan capaian realisasi kinerja sasaran ke-1 sebesar 96,5% persen, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayannya sebesar 14.99% persen.

4. Sasaran Strategis Keempat “Meningkatnya Ekspor Daerah”

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan Kedua, yaitu Peningkatan Ekspor, maka ditetapkan sasaran strategis yang keempat, yaitu Meningkatkan Ekspor Daerah

Dalam sasaran strategis yang keempat ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.18:

SASARAN STRATEGIS 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018

SASARAN STRATEGIS IV :

Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Nilai Ekspor	1.407 Trilyun	1.562 Trilyun	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.898.3 Trilyun	2.218 Trilyun	157%	Sangat Baik

Tabel 3.19 : Pencapaian Kinerja Sasaran IV Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	1.407 Trilyun	2.218 Trilyun	157 %

Tabel 3.20 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	1.407 Trilyun	1.898.3 Trilyun	2.218 Trilyun

Tabel 3.21: Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	1,622 Trilyun	2.218Trilyun	136.7 %

Tabel 3.22: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	2.2 Trilyun	2.273,05 Trilyun	Nilai ekspor non migas Indonesia Tahun 2018 mencapai US\$ 164 Milyar, sedangkan Nilai Impor Non Migas Nasional mencapai US\$ 12.51 Milyar, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Nasional Tahun 2017 Surplus US\$ 156.22 Milyar. Nilai Ekspor Non Migas Bengkulu Tahun 2018 mencapai US\$ 164 Juta, sedangkan Nilai Impor Non Migas Bengkulu mencapai US\$ 11.94 Juta, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Bengkulu Tahun 2018 Surplus US\$ 128.68 Juta.

Tabel 3.23: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2018	% Anggaran
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	1.673.910.000	13.20 %

Tabel 3.24: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	1.407 Trilyun	2.218 Trilyun	157 %	1.673.910.000	1.424.071.831	85.07 %

Tabel 3.25 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Nilai Ekspor	157%	85.07%	71,93%

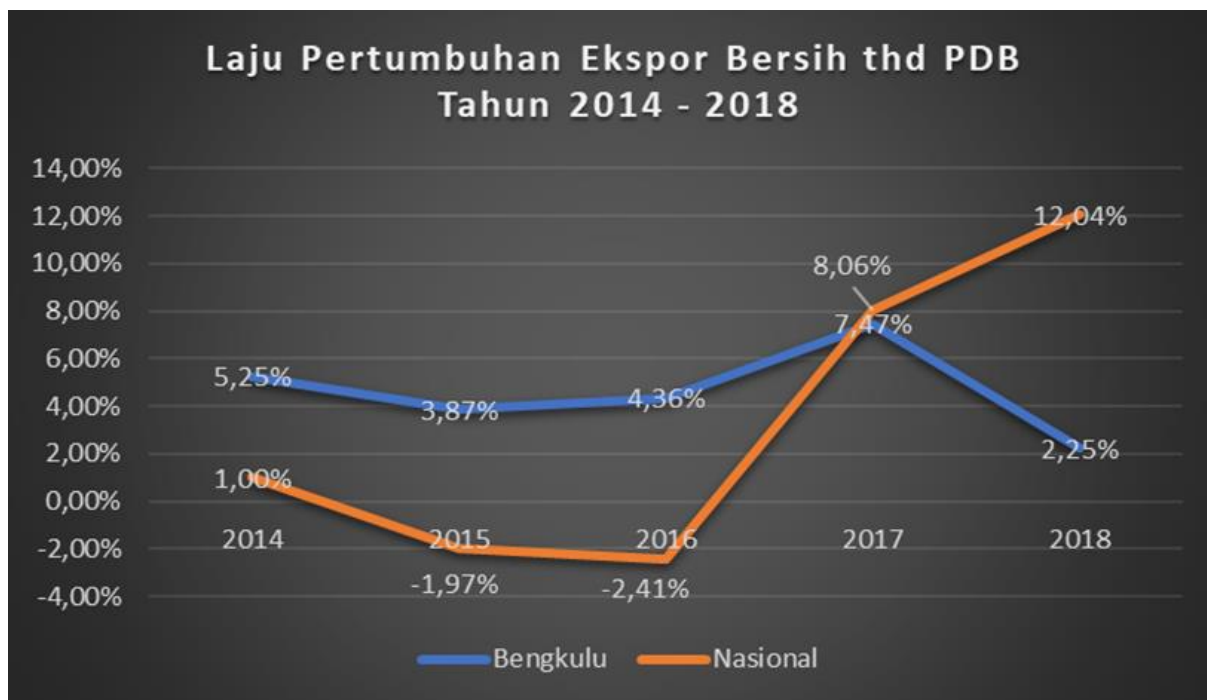
Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran keempat adalah sebagai berikut:

4.1 Indikator Kinerja Utama “Nilai Ekspor”

Peningkatan Nilai Ekspor Bengkulu meningkat sebesar 2.218 Trilyun atau sebesar 116% meskipun belum signifikan jika dibandingkan Tahun 2017 yang meningkat sebesar 178% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 1.407 Trilyun, pencapaian tahun 2018 jauh melampaui target sebesar 157%. Tingginya pencapaian target dikarenakan adanya penambahan volume ekspor komoditas batu bara.

Nilai bersih perdagangan luar negeri Bengkulu Tahun 2018 sebesar US\$ 66 Juta, dengan komoditi penyumbang ekspor daerah terbanyak adalah cangkang sawit dan batu bara. Selain itu, untuk tahun 2018, terdapat penambahan komoditi ekspor melalui damar batu dan kayu karet yang ikut menyumbang peningkatan nilai ekspor daerah tahun 2018.

Grafik. 3.10 Laju Ekspor Bersih Provinsi Bengkulu Thd Nasional (2014-2018)



Sumber Data : Pemberitahuan Ekspor Barang Bengkulu (PEB)
 Surat Keterangan Asal (SKA)
 BPS Provinsi Bengkulu, 2014 – 2018

Berdasarkan data grafik diatas, trend laju pertumbuhan ekspor bengkulu berfluktuasi dan menunjukan trend melambat dibanding tahun 2017 yang mencapai 7,47%. Kondisi ini berlawanan dengan kinerja ekspor nasional yang terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2017. Laju pertumbuhan ekspor bersih Bengkulu yang pada lima tahun kebelakang selalu berada diatas pertumbuhan ekspor bersih nasional, pada tahun 2018 turun menjadi hanya 2,25% dibawah ekspor bersih nasional.

Hal ini sejalan dengan data yang direlease Bank Indonesia selama Tahun 2018, Kegiatan Ekspor Melambat. Kegiatan ekspor tumbuh sebesar 8,39% (yoy), melambat dibandingkan triwulan lalu sebesar 10,27% (yoy). Penurunan kinerja ekspor terjadi pada ekspor antar provinsi, sementara ekspor luar negeri tercatat meningkat. Dengan pangsa ekspor mencapai 83% dari total ekspor Bengkulu, ekspor antar provinsi tumbuh sebesar 1,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,72% (yoy). Berkurangnya aktivitas perdagangan antar daerah ini sejalan dengan melambatnya perdagangan komoditas kelapa sawit dan karet akibat tekanan harga. Perlambatan ekspor yang lebih dalam teredam oleh kinerja ekspor luar negeri. Pada triwulan III 2018, ekspor luar negeri tercatat sebesar 50,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 25,81% (yoy) didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas batubara.

Pada triwulan III 2018, volume ekspor batubara tumbuh sebesar 31,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1% (yoy). Beberapa faktor yang mendukung perbaikan tersebut antara lain: (i) harga batubara internasional yang meningkat; serta (ii) meningkatnya permintaan Filipina (pangsa pasar terbesar kedua setelah Tiongkok). Pada triwulan laporan, harga batubara internasional tercatat sebesar US\$ 71,95/kg, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$ 62,13/kg. Sementara pertumbuhan volume ekspor batubara ke Filipina tercatat sebesar 73% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan sebesar 27% (yoy) seiring meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri untuk kegiatan industri manufaktur.

Kinerja ekspor luar negeri yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya ekspor CPO maupun karet. Pada triwulan III 2018, volume ekspor CPO berkontraksi sebesar 5,88% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,88% (yoy) sejalan

dengan harga CPO internasional yang belum membaik. Harga CPO internasional pada triwulan III 2018 tercatat sebesar US\$ 534/kg, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$ 601/kg. Selain itu, penurunan ekspor juga diyakini akibat negara improtir yang lebih memilih produk substitusi (minyak kedelai) dengan pertimbangan harga yang lebih kompetitif. Pada triwulan laporan, harga minyak kedelai turun hingga 15%, sementara CPO hanya turun sebesar 11%. Selanjutnya, volume ekspor karet terkontraksi sebesar 11,07% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,64% (yoy) sejalan dengan harga karet internasional yang belum membaik. Harga karet internasional pada triwulan III 2018 tercatat sebesar US\$ 1,74/kg, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$ 1,82/kg.

Pada triwulan IV 2018, kinerja ekspor meningkat terbatas. Kondisi tersebut utamanya didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan antar daerah seiring kenaikan ekspektasi konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan libur akhir tahun, termasuk bahan makanan. Sementara ekspor luar negeri diperkirakan tertahan oleh tekanan harga komoditas utama (CPO dan karet) yang terus menurun. Namun demikian, tren perbaikan harga batubara internasional diyakini dapat menahan penurunan kinerja ekspor luar negeri yang lebih dalam.

Sementara itu, Kinerja impor tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,16% (yoy). Perlambatan bersumber dari impor antar provinsi maupun luar negeri, dimana masing-masing tumbuh sebesar 4,66% (yoy) dan 61,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,25% (yoy) dan 197,73% (yoy). Penurunan impor antar provinsi tersebut seiring dengan berakhirnya Ramadhan dan Idul Fitri, dimana kebutuhan konsumsi masyarakat Bengkulu masih banyak didatangkan dari luar daerah. Sementara penurunan impor luar negeri searah dengan melambatnya kinerja investasi, dimana impor luar negeri lebih didominasi oleh mesin-mesin pembangkit dan mesin-mesin produksi. Pada triwulan IV 2018, kinerja impor meningkat yang bersumber baik dari impor antar daerah maupun luar negeri. Kenaikan impor antar daerah seiring dengan kenaikan ekspektasi konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan libur akhir tahun, sementara kenaikan impor luar negeri sejalan dengan kenaikan laju investasi, dimana impor luar negeri lebih didominasi oleh mesin dan peralatan produksi.

Tabel 3.25: Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Bengkulu Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2014 - 2018)

TAHUN	EKSPOR BENGKULU (US\$ Juta)	EKSPOR NASIONAL (US\$ Juta)	KONTRIBUSI BENGKULU (%)
2014	\$ 115.70	\$ 145,960.08	0.079%
2015	\$ 96.00	\$ 131,700.06	0.073%
2016	\$ 79.44	\$ 145,186.20	0.055%
2017	\$ 140.62	\$ 168,728.60	0.083%
2018	\$ 164.34	\$ 163,037.03	0,100%

Sumber : Pemberitahuan Ekspor Barang Bengkulu (PEB)
Surat Keterangan Asal (SKA)

Dari Tabel 3.25 dapat dilihat, ekspor Non Migas Bengkulu tahun 2018 nilainya mencapai US \$ 164.34 Juta memberikan kontribusi sebesar 0.100 % terhadap ekspor nasional tahun 2018 yang mencapai nilai US\$ 163,037 milyar. Berdasarkan data tabel tersebut diatas, bahwa kinerja ekspor impor Provinsi Bengkulu masih sangat kecil kontribusinya terhadap Ekspor Impor Nasional. Perlu berbagai upaya yang harus dilakukan kedepan guna mendorong kinerja ekspor daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kualitas produk daerah dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi serta peningkatan kemudahan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang lebih baik.

2. Meningkatkan pemanfaatan skema kerja sama perdagangan internasional dan mendorong para pengusaha untuk ekspor, serta mencetak para eksportir baru.
3. Meningkatkan partisipasi pengusaha daerah (terutama IKM) dalam jaringan produksi global. Dalam jangka menengah, diharapkan terjadi pergeseran struktur ekspor daerah dimana tidak lagi nanti bergantung kepada ekspor komoditas barang mentah seperti batubara dan cangkang sawit, tapi bergantung pada ekspor yang sudah diolah.

Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA), isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Belum tingginya penetapan target nilai ekspor Bengkulu tahun 2018 sebesar 1.407 Trilyun tidak terlepas dari pengaruh kedua faktor di atas. Beberapa regulasi yang terkait dengan ketentuan ekspor beberapa produk yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti untuk ekspor produk industri kehutanan dan pertambangan implementasinya masih memberatkan eksportir tingkat UKM. Disisi lain, belum pulihnya krisis ekonomi yang melanda negara-negara besar yang selama ini menjadi tujuan ekspor yang potensial menjadi salah satu penyebab tertekannya ekspor. Selain itu menurunnya daya beli sebagai akibat melemahnya nilai rupiah terhadap US\$ mengakibatkan dunia usaha mengurangi impor bahan baku/ bahan penolong maupun mesin/ peralatan. Berkurangnya pasokan bahan baku/ penolong tersebut menyebabkan kapasitas produksi berkurang, sehingga mengakibatkan ekspor juga berkurang.

Sebagaimana tersebut diatas, bahwa kegiatan eksportasi merupakan proses yang melibatkan mata rantai kegiatan yang cukup panjang, mulai dari bahan baku, proses produksi, promosi, pemasaran, distribusi, fiskal, perbankan, regulasi serta saranaprasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu strategi yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pada tiap-tiap mata rantai kegiatan ekspor, antara lain:

Aspek Kelembagaan:

1. Target melipat-tigakan ekspor dalam lima tahun ditetapkan sebagai Target Ekspor Nasional.
2. Perlunya payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres), termasuk di dalamnya pembentukan Tim Pencapaian Target Ekspor Nasional (TIPTEN), agar menjadi komitmen nasional dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.

Aspek Pasar:

1. Strategi pasar secara detail dirancang sesuai produk berdasarkan permintaan produk tersebut yang tinggi dan kemampuan ekspor Indonesia ke pasar tersebut masih relatif rendah sehingga potensial untuk dikembangkan serta mempertimbangkan sisi supply (komposisi bahan baku dan porsi output yang diekspor).
2. Dari sisi pemasaran, diperlukan optimalisasi market intelligence
3. Perwakilan perdagangan (Atase Perdagangan) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di semua negara perlu dioptimalkan untuk identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik, serta menjalin hubungan dengan buyer dalam rangka mempertahankan penguasaan pasar ekspor

4. Membentuk Promosi Terintegrasi (nasional dan internasional) untuk menyatukan visi-misi promosi yang selama ini terpecah di berbagai lembaga.
5. Menggencarkan promosi di dalam negeri baik skala internasional, nasional, maupun daerah.
6. Meningkatkan pengamanan perdagangan produk Indonesia di pasar internasional (tuduhan dumping, safeguards, dan subsidi oleh negara tujuan ekspor)

Aspek Regulasi/Kebijakan dan lain-lain:

1. Melakukan sinkronisasi peraturan ekspor serta sosialisasi kepada stake holder dan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor.
2. Penerapan strategi hilirisasi, yaitu melakukan ekspor dalam bentuk produk-produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Melibatkan Perguruan Tinggi untuk mengkaji produk dan pasar potensial Bengkulu
4. Penyusunan / pemetaan pengusaha potensial UKM yang berorientasi.
5. Pembuatan dashboard dengan memuat berbagai data/informasi ekspor impor yang dapat bermanfaat sebagai Early Warning System (EWS).
6. Peningkatan kerjasama antar daerah/ provinsi.
7. Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).
8. Koordinasi dengan stake holder dan dunia usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi eksportir
9. Penyelenggaraan berbagai pelatihan ekspor.
10. Peran market intelligence Perwakilan RI di luar negeri, termasuk Perwakilan Perdagangan (Atdag) dan ITPC dalam identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik dilaksanakan dengan baik.

Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran ke-4:

Dalam mencapai keberhasilan dari indikator sasaran ketiga didukung oleh realisasi kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan rincian sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai keberhasilan indikator kinerja sasaran “Nilai Ekspor” didapat dari pencapaian sebagai berikut:

- **Realisasi kinerja outcome (1)** Total Nilai Ekspor sebesar Rp. 2.218 dengan persentase capaian sebesar 157% yang didukung oleh pencapaian output (1) Nilai Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan sebesar 20.049 USD dengan pencapaian kinerja sebesar 631% (2) Nilai Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sebesar 144.293 USD dengan pencapaian kinerja sebesar 1.550% (3) Nilai Impor sebesar 77.510 USD dengan capaian kinerja sebesar 775%.
- **Realisasi kinerja outcome (2)** Pemberian jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% yang didukung oleh pencapaian output (1) Jumlah Contoh yang diuji (Sample) terhadap lima komoditi :
 - CPO: 48 Sampel
 - SIR: 55 Sampel
 - Karet Konvensional: 16 Sampel

- Kopi 2 Sampel
- Kakao 2 Sampel
- **Realisasi kinerja outcome (3)** Fasilitas Perdagangan Luar Negeri sebanyak 11 Kali fasilitas dan realisasi kinerja sebesar 100% yang didukung oleh pencapaian output (1) Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional sebanyak 7 kali dengan persentase capaian sebesar 100% (2) Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi sebanyak 1 kali dengan capaian sebesar 100% (3) Jumlah Fasilitas Pemasaran Kopi Bengkulu sebanyak 3 kali dengan capaian sebesar 100% dan (4) Jumlah IKM/UKM yang Diikutkan Pada event promosi ekspor sebanyak 18 IKM dengan persentase capaian kinerja 120%.
- **Realisasi kinerja outcome (4)** Fasilitas Layanan Ekspor dan Impor sebanyak 2 layanan dengan persentase kinerja 100% yang didukung realisasi kinerja output (1) Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan sebanyak 303 dokumen atau capaian sebesar 80% dan (2) Jumlah Dokumen API Impor yang diterbitkan sebanyak 2 dokumen dengan persentase kinerja sebesar 20%.
- **Realisasi kinerja outcome (5)** Fasilitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri sebanyak 1 fasilitas atau persentase capaian 100% yang didukung oleh realisasi capaian kinerja output (1) Informasi produk potensial ekspor daerah sebanyak 1 dokumen atau capaian 100% dan (2) Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi kebijakan ekspor daerah sebanyak 30 IKM dengan persentase capaian 100%.
- **Realisasi kinerja outcome (6)** Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan SKA dengan score sebesar 76,5% dengan persentase kinerja sebesar 122% yang didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output (1) Jumlah layanan fasilitas impor daerah sebanyak 1 layanan dengan realisasi kinerja 100% dan (2) Jumlah layanan fasilitas ekspor daerah sebanyak 1 layanan dengan realisasi kinerja 100%.
- **Realisasi kinerja outcome (7)** Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Mutu dengan realisasi capaian kinerja dengan score 78,4% atau persentase capaian sebesar 125% yang didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output (1) Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Mutu dalam 1 Tahun dengan score 78,4 dengan persentase capaian kinerja 125%
- **Realisasi kinerja outcome (8)** PAD atas Layanan Pengujian Mutu dengan capaian sebesar Rp. 11.950.000 dengan persentase capaian sebesar 20% yang didukung oleh pencapaian kinerja output (1) Persentase Layanan Administrasi Perkantoran UPTD PPMB sesuai SOP sebesar 100% dan (2) PAD atas Layanan Pengujian Mutu sebesar Rp. 11.950.000 dengan persentase capaian sebesar 20%.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis ke-4 diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Eksportir Baru dan Pelayanan Dokumen Ekspor-impor, Target indikator tersebut adalah 380 dokumen. Dengan realisasi sebanyak 305 Dokumen Ekspor Impor dengan rincian 303 Dokumen SKA dan 2 Dokumen API yang telah diterbitkan selama kurun waktu tahun 2018. Kemudahan dalam mengajukan perizinan ekspor dengan menggunakan aplikasi online dan pelatihan serta fasilitasi bagi pelaku usaha di Provinsi Bengkulu untuk menjadi eksportir akan sangat menunjang upaya daerah menumbuh kembangkan eksportir baru terutama UKM.

2. Peningkatan Fasilitas pelatihan dan bimbingan teknis diversifikasi produk berorientasi ekspor kepada IKM Provinsi Bengkulu sebanyak 30 pelaku usaha. Diharapkan dengan semakin banyaknya pelaku eksportir Bengkulu akan meningkatkan diversifikasi produk dan tujuan pasar ekspor Bengkulu yang akhirnya meningkatkan nilai ekspor Bengkulu secara keseluruhan.
3. Peningkatan fasilitas pemasaran komoditi unggulan daerah seperti kopi dan kalamansi pada skala nasional. Fasilitas pemasaran produk unggulan dalam hal ini kopi dan kalamansi dalam rangka mendorong kopi Bengkulu masuk dalam jajaran kopi dunia. Rangkaian branding kopi Bengkulu telah dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir selain itu dalam pelaksanaan fasilitas pameran kopi di tingkat nasional telah mendapatkan beberapa calon buyer yang sangat prospektif dalam meningkatkan ekspor kopi Bengkulu dalam pasar nasional. Selain itu, pada tahun 2018 Kopi Robusta Kepahiang telah mendapatkan pengakuan indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga menambah penguatan citra kopi Bengkulu di pasar kopi nasional.

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-4 diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis ini yaitu tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu.
2. Belum optimalnya pelayanan pengujian mutu barang BPPMB Tahun 2018 akibat terhapusnya klausa yang mengatur retribusi pengujian mutu barang pada PERDA Retribusi Tahun 2018 mengakibatkan pelayanan pengujian mutu barang tidak dapat dilakukan yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
3. Belum tersedianya peralatan kalibrasi dan peralatan pengujian komoditi ekspor daerah yang menjadi potensi PAD dan ditambah masih terbatasnya jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang menjadi kendala lain yang menghambat dukungan terhadap kinerja ekspor daerah;
4. Pelaksanaan promosi produk ekspor daerah masih belum dilakukan optimal karena keterbatasan anggaran;

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian

- terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu.
2. Melakukan revisi terhadap PERDA Retribusi dengan memasukkan klausa retribusi pengujian mutu barang dan kalibrasi agar menjadi dasar dalam menjalankan pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi
 3. Peningkatan Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi Sertifikasi Mutu Barang, diperlukan tambahan ruang lingkup pengujian seperti ruang lingkup pengujian minyak goreng sawit dan minyak kelapa dan penambahan alat kalibrasi. Serta melakukan promosi secara gencar, sehingga dapat berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan (eksportir) untuk mengujikan produks ekspornya dan mengkalibrasi alat labnya di Lab BPPMB. Terlebih lagi BPPMB ini telah melakukan networking dengan lab-lab besar di pusat seperti lab balai dan balai besar dibawah Kemenperind dan Kemendag.
 4. Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya perlu ditambah agar dapat mendukung pelayanan prima dan menghasilkan potensi PAD.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung pencapaian sasaran ke-4:

Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ke-1 melalui 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.673.910.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.424.071.831 atau 85.07%. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85.07% dan capaian realisasi kinerja sasaran ke-4 sebesar 157%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayannya sebesar 71,93%.

5. Sasaran Strategis Kelima “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel”

Untuk dapat mencapai misi ketiga yaitu Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional, serta dapat mencapai tujuan ketiga, yaitu Peningkatan Kualitas Kelembagaan, maka ditetapkan sasaran strategis yang kelima, yaitu Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sasaran strategis yang lima ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.26:
SASARAN STRATEGIS 5 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2014-2018

SASARAN STRATEGIS V:								
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel.								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2018	2014	2015	2016	2017	2018		

Nilai Sakip	BB	B	B	B	BB	BB	100	Baik
-------------	----	---	---	---	----	----	-----	------

Tabel 3.27 : Pencapaian Kinerja Sasaran V Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	BB	BB	100

Tabel 3.28 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018 (Asumsi)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	BB	BB	BB

Tabel 3.29 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2018 (Asumsi)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	A	BB	85%

Tabel 3.30 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018 (Asumsi)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	BB	B	100
		Nilai LPPD	BB	B	100

Tabel 3.31 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2018	% Anggaran
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	8.937.947.015	70,50%

Tabel 3.32 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Realis asi 2018	Cap aian	Target	Realisasi	Capai an
1	2	3						
5	Meningkatkan Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	BB	BB	100	8.937.947.015	8.777.686.369	98.20 %

Tabel 3.33: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatkan Tata Kelola OPD	Nilai Sakip	100	98.20%	1,8%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

5.1 Indikator Kinerja Utama Pertama “Nilai SAKIP”

Penetapan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk Asumsi capaian tahun 2018, diharapkan penilaian atas SAKIP OPD adalah sebesar 85 persen (atau kategori “BB”).

Sebagai upaya untuk mencapai nilai tersebut diatas, langkah – langkah yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan review renstra 2016 – 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017
2. Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2018 sebanyak 1 (Satu) kali
3. Melakukan penjenjangan indikator kinerja mulai dari eselon III dan IV yang merupakan penjabaran indikator kinerja utama eselon II
4. Melakukan review terhadap pencapaian IKU OPD setiap triwulan pada tahun berjalan
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing indikator setiap semester
6. Melakukan penyelarasan kembali terhadap RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, LAPORAN KINERJA

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian berbagai indikator merupakan bentuk dukungan penuh terhadap internal organisasi dalam memfasilitasi dari sisi peningkatan SDM, penyusunan

dokumen kerja, serta operasional perkantoran lainnya. Berikut ini realisasi kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebagai berikut:

- **Realisasi capaian outcome (1)** Total Nilai Evaluasi SAKIP OPD dengan kategori “BB” dan realisasi capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan serta didukung oleh pencapaian realisasi kinerja output (1) Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia sebanyak 10 Dokumen dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (2) Penjabaran Konsistensi Program Prioritas kedalam Renstra OPD sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja 100% (3) Penjabaran Konsistensi Program RENSTRA kedalam RENJA sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%
- **Realisasi capaian outcome (2)** Total Nilai Evaluasi LKPJ dengan kategori “Baik” dan capaian realisasi sebesar 100% didukung oleh pencapaian kinerja output (1) Penjabaran Konsistensi Program RENJA kedalam APBD sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (2) Frekuensi Evaluasi dan Monitoring Kinerja Program sebanyak 4 kali dengan realisasi kinerja 100% (3) Jumlah Dokumen Kinerja yang tersedia sebanyak 2 dokumen dengan realisasi kinerja 100% (4) Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia sebanyak 3 dokumen dengan realisasi kinerja 100% (5) Persentase Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Tersedia sebanyak 100% (6) Laporan Inventaris Barang dan Aset OPD yang tersediasebanyak 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100% (7) Jumlah Fasilitas/Prasarana yang disediakan sebanyak 8 gedung dengan realisasi kinerja 100% (9) Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia sebanyak 1 dokumen dengan realisasi kinerja 100%.
- **Realisasi capaian outcome (3)** Persentase tindak lanjut temuan dengan persentase penyelesaian zero temuan dan realisasi kinerja 100% yang didukung oleh capaian kinerja output (1) Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti sebesar 100% tindak lanjut dengan capaian kinerja 100%
- **Realisasi capaian outcome (4)** Persentase Perangkat Kerja yang difasilitasi IT sebanyak 1 Media dengan persentase kinerja 100% didukung oleh pencapaian kinerja ouput (1) Jumlah Media Informasi berbasis website sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja 100% dan (2) Jumlah Visitor Website sebanyak 1025 visitor dengan realisasi kinerja 103%.
- **Realisasi capaian outcome (5)** Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP sebesar 100% yang didukung oleh pencapaian kinerja ouput (1) Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan sesuai SOP sebesar 100% dan Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP sebesar 100% dengan realisasi kinerja masing – masing output sebesar 100%.

Beberapa analisa keberhasilan dari program/kegiatan pendukung pencapaian sasara strategis ke-5 diantaranya sebagai berikut:

1. Operasional Pelayanan Kantor, dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2018 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap

penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perindag Prov. Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

3. Jumlah Forum sinergi pengembangan Indag melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Forum sinergi pengembangan Indag yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Rapat Kerja Indag (yang juga berlaku sebagai Forum OPD bidang Indag se-Provinsi Bengkulu dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahun 2018) yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 bertempat di villa hijau Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari instansi Pemerintah, baik horisontal maupun vertikal. Kegiatan dimaksudkan untuk menghimpun masukan terkait dengan pengembangan urusan industri dan perdagangan di Bengkulu. Hasil dari forum tersebut juga menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindag Prov. Bengkulu (Renja OPD).

Beberapa analisa kegagalan yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ke-5 adalah Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dtrategis ini yaitu belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.

Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung pencapaian sasaran ke-5:

Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran ke-5 melalui 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dengan total anggaran sebesar Rp. 8.937.947.015 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.777.686.369 atau 98.20%. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85.07% dan capaian realisasi kinerja sasaran ke-5 sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayannya sebesar 1,8%.

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2018

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berasal dari dua sumber yaitu APBD Provinsi Bengkulu dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi pendapatan bidang perdagangan melalui layanan UPTD Balai Pengujian Mutu Barang dan Pelaksanaan Event Bengkulu Expo.

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu dengan target sebesar Rp. 60.302.000,- Realisasinya sebesar Rp. 91.950.000, - (152.5%). Adapun sumber/unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.42 dibawah ini:

No	Sumber/Unit Penghasil	Target	Realisasi	Capaian %
1	Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (BPPMB)	60.302.000, -	11.950.0000, -	19,81 %
2	Penerimaan Lain2 (Penerimaan atas penerimaan Jasa)	-	80.000.000,-	0
	Total	60.302.000,-	91.950.000,-	152.5%

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Sekretariat - Disperindag Prov. Bengkulu

2. Realisasi Keuangan Tahun 2018

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 9.978.314.692,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.264.032.093,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 92,84 persen. Sedangkan untuk **Belanja Langsung** sebesar Rp. 12.676.867.120,00,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.060.701.005,- (Dua Belas Milyar Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Rupiah) atau sebesar 95.14 persen. Berikut ini rekapitulasi program dan kegiatan terdiri dari:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase		Sisa Anggaran (Rp)
				Keu	Fisik	
A	Belanja Tidak Langsung	9.978.314.692	9.264.032.093	92.84	93.84	714.282.599
B	Belanja Langsung	12.676.867.120	12.060.701.005	95,14	96,14	616.166.115
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.509.071.680	1.423.073.946	94,30	95,30	85.997.734
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.794.374.895	6.745.570.423	99.28	100	48.804.472
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	77.435.440	75.587.000	97.61	98.61	1.848.440
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	8.897.900	35.59	45.59	16.102.100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	532.065.000	524.557.100	98.59	99.59	7.507.900

6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	137.900.000	110.601.700	80.20	81.20	27.298.300
7	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1.673.910.000	1.424.071.831	85.07	86.07	249.838.169
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	346.205.000	283.997.000	82.03	83.03	62.208.000
9	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.237.215.105	1.180.365.471	95.41	96.41	56.849.634
10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	84.590.000	83.094.500	98.23	99.23	1.495.500
11	Program Pengembangan Industri Agro	259.100.000	200.584.134	77.42	78.42	58.515.866

Sumber : Subbagian Keuangan, Tahun 2018

Penjabaran Program dan Kegiatan:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.509.071.680 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.423.073.946 atau 94,30. Output kegiatan adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan operasional dasar Dinas selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.159.971.451 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.039.630.035 atau 98.08 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembelian AC, Komputer, Laptop,Printer, Scanner, Pengadaan Meubelair, Peralatan Kebersihan, Pemasangan terali kantor, Alat-alat studio, Sound System, dll, pemasangan paping blok Halaman Kantor dan perbaikan drainase. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas sesuai standar.
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.634.403.444 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.628.445.388 atau 99.87 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Pengadaan Jasa Pengawasan dan Rehabilitasi Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor sesuai standar sebanyak 2 Paket.
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 77.495.000 atau 96.27%. Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Bengkulu. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja Dinas sesuai standar sebanyak 1 paket.

- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Perencanaan, Pelaporan dan pengelolaan informasi bidang Industri dan Perdagangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 532.065.000. realisasi anggaran sebesar Rp. 524.557.100 atau 98.59%. Output kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi urusan perindustrian dan perdagangan se-provinsi Bengkulu, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan serta pengelolaan informasi Dinas selama 1 tahun. Outcome kegiatan adalah Sinergitas perencanaan dan pelaporan dan publikasi kinerja Dinas.
- d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- e. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- g. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- h. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- i. Program Pengembangan Industri Agro

APBN Tahun Anggaran 2018 (Dekonsentrasi) sebesar Rp. 3.762.361.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.669.079.800,- (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 97.52 persen. Dengan Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 93.281.200,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dea Ratus Rupiah) atau sebesar 2,47 persen. Adapun rincian program terdiri dari sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase		Sisa Anggaran (Rp)
				Keu	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
APBN		3.762.361.000	3.669.079.800	97.52	98.52	93.281.200
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.091.519.000	1.040.057.000	95.29	96.29	51.462.000
2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	568.842.000	550.000.000	96.69	97.69	18.842.000
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.102.000.000	2.079.022.800	98.91	99.91	22.977.200

Sumber: Subbagian Keuangan, Tahun 2018



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampumenjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian atau realisasi terhadap target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran ke-1: Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Populasi Industri kecil, menengah dan besar diarahkan pada peningkatan jumlah unit usaha IKM dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Capaian kinerja sasaran ke-1 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 133.56 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-1 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori kurang dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat baik.
2. Sasaran ke-2: Dalam upaya meningkatkan penguatan struktur industri dan peningkatan produktivitas usaha industri diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Capaian kinerja sasaran ke-2 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “cukup” dan rata – rata persentase capaian 67.99 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sasaran ke-2 melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 indikator dengan kategori “baik” dan 1 (satu) indikator dengan kategori “kurang”.
3. Sasaran ke-3: Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada peningkatan unit usaha perdagangan dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap perekonomian daerah. Capaian kinerja sasaran ke-3 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 96.5 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator, 1 indikator dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori baik.
4. Sasaran ke-4: Dalam upaya meningkatkan produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Bengkulu diarahkan pada peningkatan nilai ekspor per tahun, peningkatan jumlah eksportir dan penurunan nilai impor Bengkulu. Capaian kinerja peningkatan nilai ekspor Bengkulu Tahun 2018 sebesar 157% dengan kategori “sangat baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori sangat baik.
5. Sasaran ke-5: Dalam upaya meningkatkan manajemen tata kelola OPD diarahkan kepada peningkatan sistem perencanaan yang holistik, tematik, terintegrasi dan berbasis pencapaian kinerja program, kegiatan dan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana kerja dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia per tahun.

Capaian kinerja Nilai SAKIP OPD tahun 2018 mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori “Baik” dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) melalui 1 (satu) indikator, dengan kategori baik.

Beberapa faktor keberhasilan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Peningkatan Jumlah sentra industri yang dibina dalam gerakan pemberdayaan industri dimana Jumlah sentra industri yang dibina pada tahun 2018 sejumlah 8 kawasan.
- b. Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan.
- c. Peningkatan Jumlah industri unggulan provinsi yang difasilitasi. Industri unggulan Provinsi Bengkulu yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan daerah sesuai dengan Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
- d. Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan melalui rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037
- e. Dukungan pengembangan Kawasan Terpadu Dekranasda Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya sektor industri kerajinan daerah dan mendorong DEKRANASDA untuk memfasilitasi pemasaran dari industri kerajinan daerah, pada tahun 2018 telah dilaksanakan launching/peresmian kawasan terpadu Dekranasda sebagai sentra kerajinan berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi showroom produk kerajinan daerah dari 10 Kab/Kota.
- f. Bertambahnya unit usaha industri yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018, baik sektor industri besar sedang dan sektor industri kecil menengah mengalami penambahan unit usaha dengan total unit usaha sebanyak 6.401 Unit usaha, bertambah sebanyak 353 unit usaha industri tumbuh.
- g. Meningkatnya realisasi investasi industri besar sedang di Provinsi Bengkulu. Meningkatnya realisasi investasi sektor industri besar sedang dipengaruhi oleh unit usaha yang telah mendapatkan ijin prinsip penanaman modal 3 (tiga) tahun terakhir memulai pelaksanaan investasinya di Provinsi Bengkulu. Selain itu, pada tahun 2018 juga dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan perusahaan industri besar sedang dengan cakupan 50 perusahaan Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegetar.
- h. Peningkatan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. Upaya pemuktahiran data industri kecil menengah dan industri besar sedang pada tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menyajikan kinerja industri tahun 2018. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyusunan data perkembangan industri terus dilaksanakan dalam rangka menyajikan data perkembangan yang sesuai dengan perkembangan industri daerah tahun 2018.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.
- b. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.
- c. Partisipasi aktif dalam kegiatan promosi produk dalam negeri dan penyelenggaraan Bengkulu Expo setiap tahun.
- d. Pelaksanaan Monitoring dan pembinaan pasar secara berkala;
- e. Memfasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendukung permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dalam rangka pembangunan pasar tradisional/pasar rakyat dan pembangunan sarana kemetrologian pada beberapa kabupaten/kota. Untuk tahun 2018, terdapat 28 pasar yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/kota yang difasilitasi penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan dana DAK Tahun 2018.
- f. Melaksanakan rekapitulasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan inventarisasi/pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan yang telah diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota;
- g. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar. Pengawasan dimaksud dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa. Total barang yang diawasi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mencapai 85% dari total barang yang beredar dimasyarakat.
- h. Peningkatan Monitoring dan Pengawasan Barang-barang dalam Pengawasan.
- i. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK Provinsi dengan kegiatan monitoring/kunjungan kerja dan koordinasi ke BPSK Muko Muko untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK dalam melaksanakan perlindungan konsumen serta hambatan dan kendala yang mungkin ditemui sekaligus untuk mengetahui permasalahan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
- j. Peningkatan Jumlah Eksportir Baru dan Pelayanan Dokumen Ekspor-impor, Target indikator tersebut adalah 380 dokumen. Dengan realisasi sebanyak 305 Dokumen Ekspor Impor dengan rincian 303 Dokumen SKA dan 2 Dokumen API yang telah diterbitkan selama kurun waktu tahun 2018. Kemudahan dalam mengajukan perizinan ekspor dengan menggunakan aplikasi online dan pelatihan serta fasilitasi bagi pelaku usaha di Provinsi Bengkulu untuk menjadi eksportir akan sangat menunjang upaya daerah menumbuh kembangkan eksportir baru terutama UKM.
- k. Peningkatan Fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis diversifikasi produk berorientasi ekspor kepada IKM Provinsi Bengkulu sebanyak 30 pelaku usaha. Diharapkan dengan semakin banyaknya pelaku eksportir Bengkulu akan meningkatkan diversifikasi produk dan tujuan pasar ekspor Bengkulu yang akhirnya meningkatkan nilai ekspor Bengkulu secara keseluruhan.
- l. Peningkatan fasilitasi pemasaran komoditi unggulan daerah seperti kopi dan kalamansi pada skala nasional. Rangkaian branding kopi bengkulu telah dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun terakhir selain itu dalam pelaksanaan fasilitasi pameran kopi di tingkat nasional telah mendapatkan beberapa calon buyer yang sangat prospektif dalam meningkatkan ekspor kopi bengkulu dalam pasar nasional. Selain itu, pada tahun 2018 Kopi Robusta Kepahiang telah mendapatkan pengakuan indikasi geografis dari

Kementerian Hukum dan HAM sehingga menambah penguatan citra kopi bengkulu di pasar kopi nasional.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2018 diantaranya sebagai berikut:

URUSAN PERINDUSTRIAN:

- a. Tidak tercapainya target jumlah pertambahan industri Provinsi Bengkulu dikarenakan belum optimalnya hilirisasi industri di Provinsi Bengkulu;
- b. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah di Provinsi Bengkulu
- c. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin/peralatan produksi kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan. Hal tersebut juga mempengaruhi calon wirausaha dimana belum semua calon wirausaha untuk mengurus IUMK;
- d. Beberapa kelompok usaha baru (KUB) dari beberapa sentra industri masih kesulitan modal dalam pengurusan akta notaris yang merupakan salah satu prasyarat diterimanya bantuan mesin/peralatan produksi dari Pemerintah terutama Pemerintah Daerah sehingga membuat IKM sulit berkembang dan naik kelas dalam skala usahanya saat ini. Hal menyebabkan pertambahan industri di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018 hanya pada industri mikro dan rumah tangga yang tidak memiliki legalitas formal
- e. Belum maksimalnya penyajian data perkembangan realisasi investasi dan realisasi produksi sektor besar – sedang dikarenakan masih belum adanya kesadaran perusahaan melaporkan perkembangan realisasi usaha dan nilai produksi yang menjadi salah satu indikator peningkatan nilai investasi sektor industri di Provinsi Bengkulu sehingga menyebabkan pendataan yang dilakukan aparatur kabupaten/kota masih belum menyajikan data secara menyeluruh;
- f. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM karena tidak tersedianya anggaran dalam pemuktahiran data IKM, sehingga pemuktahiran data masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat;
- g. Belum tersedianya sistem atau instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama;
- h. Beberapa unit usaha ditemukan vakum produksi artinya tidak ditemukan proses produksi akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitor baru sehingga mempengaruhi peningkatan unit usaha dan peningkatan realisasi investasi. Adapun peningkatan unit usaha dan realisasi investasi hanya terjadi pada wirausaha baru yang tumbuh pada tahun 2018.

URUSAN PERDAGANGAN:

- a. Tidak tercapainya target Jumlah BPSK yang terbentuk disebabkan oleh tidak. Peralihan kewenangan dari Kab/Kota menjadi kewenangan Provinsi juga mengharuskan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk perekrutan anggota dan sekretariat BPSK serta operasional BPSK di Kab/Kota.

- b. Beberapa pemerintah daerah belum memiliki data yang lengkap mengenai kondisi pasar tradisional, pasar modern, maupun sarana gudang yang ada di wilayahnya. Bahkan masih terdapat daerah yang belum memiliki data gudang di wilayahnya.
- c. Belum maksimalnya penyajian data Informasi Perdagangan berupa Jumlah SIUP, TDP dan TDG yang terdata karena belum terakomodirnya kegiatan pengolahan entry data karena keterbatasan anggaran. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara unit/instansi yang menerbitkan SIUP, TDP dan TDG dengan instansi yang mengurus perdagangan pada kabupaten/kota (selaku instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembuatan SIUP dan TDP). Hal ini terlihat dari belum semua instansi teknis (Dinas Urusan Perdagangan) yang ada di daerah yang memiliki serta dapat menyampaikan data/laporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dikarenakan tidak lancarnya input laporan dari instansi penerbit.
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi terkait Jumlah gudang dengan sistem resi gudang karena keterbatasan anggaran. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan kebijakan baru terkait sarana pergudangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, yang menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dimana salah satu pokok perubahannya adalah pengaturan mengenai klasifikasi gudang yang lebih tegas dan jelas karena telah mengakomodir ketentuan mengenai klasifikasi gudang terbuka maupun gudang tertutup, termasuk indikator klasifikasi yang diperjelas dengan kriteria luas dan indikator volume. Namun kebijakan tersebut belum maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran yang mendukung kinerja sub sektor perdagangan dalam negeri.
- e. Kendala kinerja ekspor impor daerah yang paling utama adalah tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Bengkulu.
- f. Belum optimalnya pelayanan pengujian mutu barang BPPMB Tahun 2018 akibat terhapusnya klausa yang mengatur retribusi pengujian mutu barang pada PERDA Retribusi Tahun 2018 mengakibatkan pelayanan pengujian mutu barang tidak dapat dilakukan yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
- g. Belum tersedianya peralatan kalibrasi dan peralatan pengujian komoditi ekspor daerah yang menjadi potensi PAD dan ditambah masih terbatasnya jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang menjadi kendala lain yang menghambat dukungan terhadap kinerja ekspor daerah;
- h. Pelaksanaan promosi produk ekspor daerah masih belum dilakukan optimal karena keterbatasan anggaran.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

ASPEK KELEMBAGAAN:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang industri dan perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan ,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
6. Melakukan revisi terhadap PERDA Retribusi dengan memasukkan klausa retribusi pengujian mutu barang dan kalibrasi agar menjadi dasar dalam menjalankan pelayanan pengujian mutu barang dan kalibrasi
7. Peningkatan Pemeliharaan dan peningkatan Kemampuan Lab. Pengujian dan Kalibrasi Sertifikasi Mutu Barang, diperlukan tambahan ruang lingkup pengujian seperti ruang lingkup pengujian minyak goreng sawit dan minyak kelapa dan penambahan alat kalibrasi. Serta melakukan promosi secara gencar, sehingga dapat berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggan (eksportir) untuk mengujikan produknya dan mengkalibrasi alat labnya di Lab BPPMB. Terlebih lagi BPPMB ini telah melakukan networking dengan lab-lab besar di pusat seperti lab balai dan balai besar dibawah Kemenperind dan Kemendag.
8. Jumlah SDM Fungsional sertifikasi mutu barang yang ditingkatkan kompetensinya perlu ditambah agar dapat mendukung pelayanan prima dan menghasilkan potensi PAD

ASPEK URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Menfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
2. Menfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;

3. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
4. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
5. Melakukan pemuktahiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
6. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk Kabupaten/Kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra – sentra yang vakum atau berhenti produksi untuk kemudian difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal dan bantuan peralatan/mesin;
7. Melakukan pembinaan dari aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk maju dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar;
8. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuhkan kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
9. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya;
10. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu
11. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan.
12. Dalam rangka mendorong kinerja ekspor daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan

Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2019
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Bengkulu

H. LIERWAN,SE
Pembina Utama Madya (IV/c)
Nip. 19610420 198512 1 001

DAFTAR

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Impact 1	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	%	14,9	52	349%
		Outcome 1	Persentase Pertumbuhan Unit industri pengolahan non-migas besar sedang	%	14,9	52	349%
		Output 1.1	Jumlah Unit industri pengolahan non-migas besar sedang	Unit Usaha	10	26	260%
		Output 1.2	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang RPIP	Dok	1	1	100%
		Output 1.3	Cakupan binaan perusahaan industri besar sedang	Perusahaan	30	50	167%
		Outcome 2	Persentase Pertumbuhan Unit industri kecil	%	9%	4,58%	51%
		Output 2.1	Jumlah Wirausaha Baru Kelompok Nelayan	WUB	50	60	120%
		Output 2.2	Jumlah Unit Usaha Baru Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan,Kimia, Barang dari Kayu,Furnitur,Kimia,Sandang & Aneka Kerajinan	WUB	100	101	101%
		Output 2.3	Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan,Kimia, Barang dari Kayu,Furnitur,Kimia,Sandang & Aneka Kerajinan	WUB	115	395	343%
		Output 2.4	Jumlah IKM yang Memperoleh Pembinaan Melalui Dekranasda	Kali	3	3	100%
		Output 2.5	Jumlah Produk OVOP yang dikembangkan	Produk	2	3	150%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Impact 2	Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar	176,5	427	242%
		Outcome 1	Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang	Milyar	100	224	224%
		Output 1.1	Nilai Investasi Sektor Industri besar sedang Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar	Milyar	100	224	224%
		Output 1.2	Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan,Kimia, Barang dari Kayu,Furnitur,Kimia,Sandang & Aneka Kerajinan	Milyar	50	102,9	206%
		Output 1.3	Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Elektronik,Alat Angkut & Sumber Daya Industri	Milyar	26,3	100	380%
		Output 1.4	Jumlah Kab/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Sentra OVOP	Kab/Kota	10	3	30%
		Output 1.5	Jumlah IKM yang Difasilitasi HAKI/ Pendaftaran Merk	IKM	10	64	640%
		Impact 3	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	Persen	4%	5,43%	136%
		Outcome 1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri besar sedang	Tenaga Kerja	200	190	95%
		Output 1.1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri besar sedang Industri Hasil Hutan & Perkebunan Hasil laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar	Tenaga Kerja	200	190	95%
		Outcome 2	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor industri kecil	Tenaga Kerja	9.240	18.382	199%
		Output 2.1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan,Kimia, Barang dari Kayu,Furnitur,Kimia,Sandang & Aneka Kerajinan	Tenaga Kerja	9.105	17.652	194%
		Output 2.2	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Elektronik,Alat Angkut & Sumber Daya Industri	Tenaga Kerja	135	730	541%
		Impact 4	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	6,30%	6,15%	98%
		Outcome 1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	6,30%	6,15%	98%
		Output 1.1	Cakupan pemantauan dan pengawasan perusahaan industry besar sedang	Perusahaan	30	50	167%
		Output 1.2	Jumlah dokumen Masterplan dan Perencanaan/ DED Perintisan Kawasan Industri dan Kawasan Khusus yang telah disusun	Dok	1	0	0%
		Outcome 2	Nilai Investasi Sektor Industri Kecil	Milyar	176,5	202,9	115%
		Output 2.1	Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan,Kimia, Barang dari Kayu,Furnitur,Kimia,Sandang & Aneka Kerajinan	Milyar	50	102,9	206%
		Output 2.2	Nilai Investasi Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Industri Kecil Menengah (IKM) Logam,Mesin, Elektronik,Alat Angkut & Sumber Daya Industri	Milyar	26,3	100	380%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Impact 1	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	Persen	9%	9%	100%
		Outcome 1	Persentase peningkatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	10%	38%	384%
		Output 1.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Pedagang	50	100	200%
		Output 1.2	Pertumbuhan Omset pedagang pasar rakyat Tipe B	Persen	20%	36,31%	182%
		Ouput 1.3	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	Kali	10	12	120%
		Output 1.4	Jumlah Dokumen Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Dok	1	1	100%
		Output 1.5	Frekuensi Publikasi Perkembangan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok	Kali	4	4	100%
		Output 1.6	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi	Dok	1	1	100%
		Impact 2	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	Persen	14,10%		0%
		Outcome 1	Jumlah Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Dok	1	1	100%
		Output 1.1	Jumlah Dokumen Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Dok	1	1	100%
		Output 1.2	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi	Dok	1	1	100%
		Outcome 2	Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan	Persen	85%	85%	100%
		Output 2.1	Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Barang/Jasa	Kali	2	2	100%
		Output 2.2	Persentase Produk dan Jasa yang diawasi sesuai dengan ketentuan		85%	80%	94%
		Outcome 3	Cakupan Pengawasan Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)	Kab/Kota	2	2	100%
		Output 3.1	Jumlah terlaksananya Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)	Kali	2	4	200%
		Outcome 4	Penyelesaian Sengketa Konsumen	Fasilitasi	2	4	200%
		Output 4.1	Jumlah Penyelesaian Sengketa melalui Operasionalisasi BPSK	Fasilitasi	2	2	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
4	Meningkatnya Ekspor Daerah	Impact 1	Nilai Ekspor Bersih	Trilyun	1.407	2.218	158%
		Outcome 1	Total Nilai Ekspor	Trilyun	1.407	2.218	158%
		Output 1.1	Nilai Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Dollar	\$ 3.178,70	\$ 20.049,00	631%
		Output 1.1	Nilai Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Dollar	\$ 9.307,90	\$ 144.293,00	1550%
		Output 1.3	Nilai Impor	Dollar	\$ 10.000,00	\$ 77.510,00	775%
		Outcome 2	Pemberian jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor.	Komoditi	5	5	100%
		Output 2.1	Jumlah Contoh yang diuji (Sample) terhadap lima komoditi :				
			- CPO:	Sampel	110	48	44%
			- SIR:	Sampel	140	55	39%
			- Karet Konvensional:	Sampel	40	16	40%
			- Kopi	Sampel	20	2	10%
			- Kakao	Sampel	10	2	20%
		Outcome 2	Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri	Kali	1	1	100%
		Output 2.1	Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Kali	17	7	41%
		Output 2.2	Jumlah Penyelenggaraan Event Promosi	Kali	1	1	100%
		Output 2.3	Jumlah Fasilitasi Pemasaran Kopi Bengkulu	Kali	3	3	100%
		Output 2.4	Jumlah IKM/UKM yang Diikuti Pada event promosi ekspor	IKM	15	18	120%
		Outcome 3	Fasilitasi Layanan Ekspor dan Impor	Kali	2	2	100%
		Output 3.1	Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan	Dok	380	303	80%
		Output 3.3	Jumlah Dokumen API Impor yang diterbitkan	Dok	10	2	20%
		Outcome 4	Fasilitasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Kali	1	1	100%
		Output 4.1	Informasi produk potensial ekspor daerah	Dok	1	1	100%
		Output 4.2	Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi kebijakan ekspor daerah	IKM	30	30	100%
		Outcome 5	Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	62,51%	76,50%	122%
		Output 5.1	Jumlah layanan fasilitasi impor daerah	Layanan	1	1	100%
		Output 5.2	Jumlah layanan fasilitasi ekspor daerah	Layanan	2	2	100%
		Outcome 6	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Mutu	Persen	62,51%	78,40%	125%
		Output 6.1	Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pengujian Mutu dalam 1 Tahun	Triwulan	1	1	100%
		Outcome 7	PAD atas Layanan Pengujian Mutu	Rupiah	60.302.000	11.950.000	20%
		Output 7.1	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran UPTD PPMB sesuai SOP	Persen	100%	100%	100%
		Output 7.2	PAD atas Layanan Pengujian Mutu	Rupiah	60.302.000	11.950.000	20%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
5	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Impact	Nilai Evaluasi Sakip	Score	BB	BB	100%
		Outcome 1	Total Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Score	BB	BB	100%
		Output 1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dok	10	10	100%
		Output 1.2	Penjabaran Konsistensi Program Prioritas kedalam Renstra OPD	Persen	100%	100%	100%
		Output 1.3	Penjabaran Konsistensi Program RENSTRA kedalam RENJA	Persen	100%	100%	100%
		Outcome 2	Total Nilai Evaluasi LKPJ	Score	85	85	100%
		Output 2.1	Penjabaran Konsistensi Program RENJA kedalam APBD	Persen	100%	100%	100%
		Output 2.2	Frekuensi Evaluasi dan Monitoring Kinerja Program	Kali	4	4	100%
		Output 2.3	Jumlah Dokumen Kinerja yang tersedia	Dok	2	2	100%
		Output 2.4	Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	Dok	3	3	100%
		Output 2.5	Persentase Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Tersedia	Persen	100%	100%	100%
		Output 2.6	Laporan Inventaris Barang dan Aset OPD yang tersedia	Laporan	1	1	100%
		Output 2.7	Jumlah Fasilitas/Prasarana yang disediakan	Gedung	8	8	100%
		Output 2.8	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia	Dok	1	1	100%
		Outcome 3	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	100%	100%	100%
		Output 3.1	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	Persen	100%	100%	100%
		Outcome 4	Persentase Perangkat Kerja yang difasilitasi IT	Unit	1	1	100%
		Output 4.1	Jumlah Media Informasi berbasis website	Website	1	1	100%
		Output 4.2	Jumlah Visitor Website	Visitor	1000	1025	103%
		Outcome 5	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP	Persen	100%	100%	100%
		Output 5.1	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan sesuai SOP	Persen	100%	100%	100%
		Output 5.2	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP	Persen	100%	100%	100%

Bengkulu, 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



M. LERWAN, SE
NP. 19610420 198512 1 001

SASARAN 10
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM DAN KOPERASI SERTA BERKEMBANGNYA SARANA PERDAGANGAN RAKYAT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA			FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT
			TAHUN 2017 REALISASI	TAHUN 2018		
				REALISASI	%	
1	Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan	810 IKM/UKM	410 IKM	700 IKM	86,42%	Kinerja tahun 2018 lebih meningkat dibandingkan Tahun 2017 dikarenakan beberapa program dan kegiatan baik perdagangan dan perindustrian secara bersama - sama melakukan program pemberdayaan industri kecil menengah berbasis masyarakat perdesaan mulai dari hulu yaitu dari aspek peningkatan kualitas produksi sampai dengan hilir yaitu aspek promosi pemasaran produk IKM Unggulan daerah di pasar nasional. selain itu juga dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan penciptaan wirausaha - wirausaha baru seperti pemberdayaan kampung nelayan dan pemberdayaan industri kreatif daerah
2	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	5 Sentra	0	1	20,00%	Bantuan peralatan sampai dengan Tahun 2018 belum dapat direalisasikan akibat terkendala dengan Permendagri tentang Hibah barang yang mewajibkan IKM harus berbadan hukum. Bantuan peralatan untuk masyarakat kampung nelayan juga terkendala karena kelompok usaha bersama yang dibina tidak memiliki badan hukum. direkomendasikan kepada dinas/instansi yang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi terkait fasilitasi badan hukum usaha agar membuat kegiatan fasilitasi badan hukum untuk IKM dan Masyarakat Kampung Nelayan yang masuk dalam Kelompok Usaha Bersama.
3	Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi (Unit)	10	9	32	280%	Pada tahun 2018, terdapat 6 kabupaten/kota yang diberikan dana alokasi khusus untuk merevitalisasi pasar tradisional dengan total 28 pasar. Dukungan dana alokasi khusus tersebut telah membantu tercapainya pasar yang direvitalisasi di daerah tahun 2018

SASARAN 9
MENINGKATKANNYA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS KEWILAYAHAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA			FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT
			TAHUN 2017 REALISASI	TAHUN 2018		
				REALISASI	%	
1	Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (Sentra)	2 Kab, 5 Sentra	0	6 Kab, 6 Sentra	20,00%	Kinerja tahun 2018 lebih meningkat dibandingkan Tahun 2017 dikarenakan beberapa program dan kegiatan baik perdagangan dan perindustrian secara bersama - sama melakukan program pemberdayaan industri kecil menengah berbasis masyarakat perdesaan mulai dari hulu yaitu dari aspek peningkatan kualitas produksi sampai dengan hilir yaitu aspek promosi pemasaran produk IKM Unggulan daerah di pasar nasional. selain itu juga dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan penciptaan wirausaha - wirausaha baru seperti pemberdayaan kampung nelayan dan pemberdayaan industri kreatif daerah

Bengkulu, 2019
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU


H. LIERWAN, SE
NP. 19610420 198512 1 001

SASARAN 10
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM DAN KOPERASI SERTA BERKEMBANGNYA SARANA PERDAGANGAN RAKYAT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA						FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
							REALISASI	%	
1	Jumlah IKM/UKM yang mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan	810 IKM/UKM	425	440	350	410 IKM	700 IKM	86,42%	Kinerja tahun 2018 lebih meningkat dibandingkan Tahun 2017 dikarenakan beberapa program dan kegiatan baik perdagangan dan perindustrian secara bersama - sama melakukan program pemberdayaan industri kecil menengah berbasis masyarakat perdesaan mulai dari hulu yaitu dari aspek peningkatan kualitas produksi sampai dengan hilir yaitu aspek promosi pemasaran produk IKM Unggulan daerah di pasar nasional. selain itu juga dilaksanakan kegiatan penumbuhan dan penciptaan wirausaha - wirausaha baru seperti pemberdayaan kampung nelayan dan pemberdayaan industri kreatif daerah
2	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	5 Sentra	5	0	0	0	1	20,00%	Bantuan peralatan sampai dengan Tahun 2018 belum dapat direalisasikan akibat terkendala dengan Permendagri tentang Hibah barang yang mewajibkan IKM harus berbadan hukum. Bantuan peralatan untuk masyarakat kampung nelayan juga terkendala karena kelompok usaha bersama yang dibina tidak memiliki badan hukum. direkomendasikan kepada dinas/instansi yang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi terkait fasilitasi badan hukum usaha agar membuat kegiatan fasilitasi badan hukum untuk IKM dan Masyarakat Kampung Nelayan yang masuk dalam Kelompok Usaha Bersama.
3	Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi (Unit)	10	1	10	6	9	32	320,00%	Pada tahun 2018, terdapat 6 kabupaten/kota yang diberikan dana alokasi khusus untuk merevitalisasi pasar tradisional dengan total 28 pasar. Dukungan dana alokasi khusus tersebut telah membantu tercapainya pasar yang direvitalisasi di daerah tahun 2018

SASARAN 9
MENINGKATKANNYA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS KEWILAYAHAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA						FAKTOR PENDUKUNG/FAKTOR PENGHAMBAT
			TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
							REALISASI	%	
1	Jumlah kabupaten yang dikembangkan sentra industrinya (Sentra)	2 Kab, 5 Sentra	3 Kab, 5 Sentra	5 Kab, 6 Sentra	7 Kab, 7 Sentra	10 Kab, 10 Sentra	6 Kab, 6 Sentra	210,00%	Kabupaten yang dikembangkan sentranya meliputi Sentra Kopi di Kab. Rejang Lebong, Sentra Jeruk Gerga di Kab. Lebong, Sentra Sirup Kalamansi di Kota Bengkulu, Sentra Tenun di Kab. Seluma, Sentra Produk Olahan Berbahan Dasar Ikan di Kab. Muko Muko, Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Kaur. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut: (1) Sinergitas Output beberapa Kegiatan dimana masing - masing Kegiatan berdasarkan sub urusan masing - masing diarahkan fokus kepada pencapaian target indikator kinerja utama OPD yaitu Jumlah Kab dan Sentra yang dikembangkan melalui gerakan pemberdayaan dari aspek hulu ke hilir meliputi Pelatihan teknis, Pendampingan, Fasilitasi dan Pemasaran. (2) Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang terarah mendukung IKU Utama. (3) Pelaksanaan Kegiatan berbasis efisiensi dan efektifitas dimana dengan Anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja melampau target yang ada, (4) Semua Program dan Kegiatan yang dianggarkan mendukung Program Prioritas Daerah 2016-2021

Bengkulu, 2019
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI BENGKULU

 H. LILWAN, SE
 NP. 19610420 198512 1 001